



Laporan Lapangan

Pola Penanaman dan Pemasaran Padi di Desa Mojosari*, Kabupaten Jombang Tahun 2001

*Bukan nama sebenarnya

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu dan tidak berhubungan atau mewakili Lembaga Penelitian SMERU maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-336336.
Fax: 62-21-330850, Web: www.smeru.or.id atau e-mail: smeru@smeru.or.id,

Bambang Soelaksono

Sri Kusumastuti Rahayu

James Fox

Nuning Akhmadi

(Editor)

Kerjasama Lembaga Penelitian
SMERU dengan Research School
of Pacific and Asian Studies
of the Australian National
University

Juni 2003

PRAKATA

Laporan ini ditulis berdasarkan hasil observasi dan kunjungan lapangan Tim Peneliti SMERU di Desa Mojosari¹, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, pada bulan Mei 2001. Tujuan kunjungan adalah untuk melihat perubahan yang terjadi di wilayah tersebut, khususnya mengenai pola penanaman dan pemasaran padi selama kurun waktu 15 tahun terakhir.

Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua setelah pada tahun 1985 dua diantara anggota tim peneliti² melakukan kunjungan yang sama ke desa tersebut. Kunjungan dilakukan dengan mengadakan observasi dan pengamatan lapangan, serta melakukan *in-depth interview* terhadap para informan kunci mengenai kegiatan produksi dan pemasaran padi di daerah tersebut. Informasi diperoleh dari para petani, *bakul/loper*, *penebas*, pedagang beras/*gabah*, pemilik toko sarana produksi pertanian (*saprotan*), pengusaha penggilingan padi (*selep*), pedagang beras di pasar, pengusaha/pedagang besar pemasok Dolog, penangkar benih, dan konsumen akhir. Dari unsur pemerintah antara lain diwawancarai aparat Dinas Pertanian Kabupaten, Kantor Statistik, PPL, dan pamong desa Mojosari. Selain itu juga diwawancarai tokoh masyarakat, pemilik *wartel* (warung telpon), peternak sapi, pedagang, pengrajin tempe, pengrajin bata merah, dan lain-lain.

Penghargaan disampaikan kepada Pak Proto dan keluarga yang telah bersedia menjadi kontak kami di Desa Mojosari sejak kunjungan pertama hingga kunjungan kedua. Kami berterima kasih kepada informan dan responden, kepala desa dan pamong desa, serta masyarakat di Desa Mojosari yang telah bersedia membantu dan menyisihkan waktunya untuk memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

¹ Bukan nama yang sebenarnya.

² Bambang Soelaksono dan James J. Fox .

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
SINGKATAN	iv
I. GAMBARAN UMUM WILAYAH	1
Kondisi Wilayah	1
Pola Tanam	2
Kegiatan Ekonomi yang Menonjol Selain Usahatani	4
II. PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN	6
Pemilihan Benih	6
Persiapan Tanah	7
Persiapan Pembibitan dan Penanaman	7
Pemupukan	8
Menyiangi Tanaman	10
Menyemprot Hama	10
Mengairi Sawah	11
Biaya Usahatani	12
Sumber Modal Usahatani	14
III. PANEN DAN PASCA PANEN	15
Pilihan Sistem Panen	15
Tenaga Kerja Panen dan Pasca Panen	15
Tingkat Produksi	17
IV. PEMASARAN	19
V. HARGA DAN TINGKAT KEUNTUNGAN	25
Harga Gabah dan Beras	25
Tingkat Keuntungan	27
VI. KESIMPULAN	30
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Luas Areal Sawah di Kabupaten Jombang Tahun 2001	1
Tabel 2.	Luas Panen dan Hasil Panen di Lembah Brantas Tahun 1984 dan 2001	2
Tabel 3.	Tenaga Kerja dan Biaya Tenaga Kerja Usahatani Padi Sawah per Ha Tahun 2001	
Tabel 4.	Biaya Saprodi Usahatani Padi Sawah per Ha Tahun 2002	13
Tabel 5.	Persyaratan Kualitas Gabah pada Pembelian Kontraktor dan Satgas dari Petani Tahun 2001	19
Lampiran 1.	Rata-rata Produksi dan Pengeluaran per Ha Usahatani Jagung Muda di Desa Mojosari Tahun 2001	33
Lampiran 2.	Harga Benih Padi dan Palawija di Desa Mojosari Tahun 2001	33
Lampiran 3.	Jenis dan Harga Pestisida di Desa Mojosari Tahun 1984 dan 2001	34
Lampiran 4.	Rata-rata Produksi dan Pengeluaran per Ha Usahatani Padi Sawah di Jawa Timur Tahun 1998/1999	35
Lampiran 5.	Impor Beras oleh Bulog dan Swasta Tahun 1990-2000 (dalam Ton)	36
Lampiran 6.	Kebijakan Harga Gabah dan Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah Tahun 1974-2001	37
Lampiran 7.	Harga Eceran Pupuk di Indonesia Tahun 1969-2001	38

SINGKATAN

BS	=	<i>Basic Seed</i>
Bulog	=	Badan Urusan Logistik
Dolog	=	Depot Logistik
ES	=	<i>Elementary Seed</i>
FS	=	<i>Foundation Seed</i>
GKG	=	Gabah Kering Giling
GKL	=	Gabah Kering Lumbung
GKP	=	Gabah Kering Panen
GKS	=	Gabah Kering Simpan
KUD	=	Koperasi Unit Desa
KUT	=	Kredit Usaha Tani
PBB	=	Pajak Bumi dan Bangunan
PPL	=	Petugas Penyuluh Lapangan
SS	=	<i>Stock Seed</i>
UU	=	Undang-Undang

I. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kondisi Wilayah

Masih seperti saat kunjungan pertama pada tahun 1985,³ lembah Kali Brantas tetap menjadi daerah lumbung beras terbesar kedua untuk tanaman pertanian sawah beririgasi di Pulau Jawa.⁴ Lumbung beras ini meliputi wilayah Kabupaten Nganjuk, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo dan Surabaya. Kabupaten Jombang, dimana Desa Mojosari berada, luasnya 1.159,49 km² atau sekitar 2,4% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Pada tahun 2001 jumlah penduduk Kabupaten Jombang 1.135.285 orang dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.249 jiwa per km². Luas areal persawahan 49.639 ha atau 42,8% dari luas wilayah. Sekitar 83,3% areal sawah mempunyai irigasi teknis yang umumnya ditanami padi, jagung, kedelai, atau tebu. Jika dibanding dengan keadaan tahun 1984 pada kunjungan pertama, luas areal sawah irigasi teknis pada saat itu mencapai 57.835 ha. Hal ini berarti luas areal persawahan di Kabupaten Jombang telah mengalami penurunan sekitar 27,9%. Selain karena telah terjadi pengalihan tata guna lahan, penurunan areal persawahan juga disebabkan karena saluran irigasi tersier di beberapa desa telah rusak, termasuk yang ada di Desa Mojosari.

Tabel 1. Luas Areal Sawah di Kabupaten Jombang Tahun 2001

No.	Jenis Sawah	Luas (ha)	(%)
1	Irigasi teknis	41.351	83,3
2	Irigasi ½ teknis	1.324	2,7
3	Irigasi sederhana	753	1,5
4	Tadah hujan	4.897	9,9
5	Lainnya	1.317	2,6
	Total	49.639	100,0

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, 2001.

Dibandingkan dengan keadaan tahun 1984, pada tahun 2001, luas areal panen padi di wilayah lembah Brantas telah mengalami sedikit penurunan (lihat Tabel 2). Total areal panen pada tahun 2001 sekitar 250,6 ribu ha, atau turun sekitar 0,15% dibanding tahun 1984, dan total produksi turun 1,5% menjadi 1,33 juta ton. Produksi padi menurun dari rata-rata 5,36 ton pada tahun 1984 menjadi 5,32 ton per ha pada tahun 2001. Di seluruh wilayah lembah Kali Brantas, penurunan areal panen padi pada tahun 2001 menunjukkan angka sebagai berikut: Sidoarjo 7.014 ha (19,03%), Kediri 7.921 ha (12,35%), dan Mojokerto 3.252 ha (7,55%). Sebaliknya wilayah Nganjuk justru mengalami kenaikan areal panen padi lebih dari 12.989 ha (24,9%). Sementara itu di Jombang juga mengalami kenaikan sebesar 4.824 ha atau 8,08% (lihat Tabel 2). Bertambahnya luas areal panen di Nganjuk karena pada tahun 1990-

³ Kunjungan pertama dilakukan oleh James J. Fox, Tri Kadarsilo dan Bambang Soelaksono. Lihat *Rice Growing and Marketing in Mojosari, Kabupaten Jombang in 1985, 7 November 1989* (tidak diterbitkan).

⁴ Lumbung beras terbesar pertama adalah lembah kali Citarum dengan waduk Jatiluhurnya di Jawa Barat, yang meliputi wilayah Kabupaten Subang, Karawang, Bekasi dan Purwakarta.

an telah dibangun sebuah bendungan Kali Brantas di daerah Gampengrejo, Kediri yang mengairi sawah-sawah di daerah tersebut. Sedangkan di Jombang karena semakin banyaknya penggunaan sarana irigasi yang menggunakan pompa air bor untuk mengairi sawah-sawah, terutama pada musim kemarau.

Tabel 2. Luas Panen dan Hasil Panen Padi di Lembah Brantas Tahun 1984 dan 2001

Daerah	Luas Panen (ha)		Hasil Panen (ton)			
			1984		2001	
	1984	2001	Rata-rata/ha	Total	Rata-rata/ha	Total
1. Kediri	64.135	56.214	5,695	365.255	5.200	292.289
2. Jombang	54.903	59.727	5,679	311.811	5.238	312.848
3. Mojokerto	43.054	39.802	5,142	221.395	5.764	229.429
4. Sidoarjo	36.858	29.844	5,377	198.195	5.486	163.717
5. Nganjuk	52.113	65.102	4,923	256.556	5.140	334.602
Total	251.063	250.689	5,363	1.353.212	5.317	1.332.885

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, 1984 dan 2001.

Secara umum kegiatan ekonomi masyarakat Desa Mojosari sekarang semakin beragam, terutama karena sarana transportasi dan komunikasi di daerah ini semakin membaik. Jaringan listrik telah masuk desa sejak tahun 1988 dan kini di seluruh wilayah desa sudah dialiri listrik. Sarana komunikasi seperti telepon juga telah sampai ke desa, sehingga sarana "wartel" (warung telpon) telah ada di Desa Mojosari sejak tahun 2000.

Inisiatif petani Desa Mojosari untuk menunjang kegiatan pertanian cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya petani yang membuat sumur bor di sekitar sawahnya. Air sumur bor dipompa dengan pompa air yang menggunakan mesin diesel. Sumur bor ini terutama sangat bermanfaat untuk mengairi sawah di musim kemarau. Kedalaman sebuah sumur bor dapat mencapai 15 – 18 meter. Petani yang tidak memiliki mesin diesel dapat menyewa dari petani pemilik diesel. Selain itu, sekarang telah ada jasa penggilingan padi dengan mesin *huller (selep)* keliling yang mengunjungi dari satu rumah ke rumah lainnya pada waktu diperlukan. Kesemuanya itu semakin memudahkan petani dalam menjalankan usahanya.⁵ Ongkos menggiling padi adalah 1/13 bagian dari jumlah beras hasil giling, sementara *sekam* (kulit padi) dan *menir* (pecahan kecil beras) tetap menjadi milik petani. Usaha *selep* keliling ini telah melumpuhkan beberapa usaha *selep* menetap milik beberapa orang petani di Desa Mojosari.

⁵ *Selep* keliling pertama kali ada pada tahun 1997 di Kecamatan Nggodo dimana ada perakit/bengkel yang mula-mula membuat. Gagasan ini muncul dari petani sendiri, yaitu dengan memanfaatkan mobil bekas. Sekarang di Jombang ada sekitar 131 *selep* keliling dengan harga sekitar Rp22 juta per unit.

Pola Tanam

Pada kunjungan kedua ini, pola tanam lahan sawah dalam kurun waktu satu tahun terakhir di Desa Mojosari adalah sebagai berikut: padi-padi-padi; padi-padi-jagung; padi-jagung-jagung; atau padi-tebu. Selain itu, petani juga menanam tanaman lain seperti kedelai, dan aneka sayuran, walaupun dalam jumlah relatif sedikit.

Pola tanam saat ini tidak banyak mengalami perubahan dibanding dengan keadaan tahun 1985. Perubahan lebih nampak pada proporsi luas tanam, meskipun tidak selalu sama pada setiap musim atau tahun. Misalnya, sejak krisis ekonomi banyak petani mengalihkan usaha pertaniannya ke tanaman tebu karena pada saat itu menanam tebu dianggap lebih menguntungkan daripada menanam padi. Diperkirakan peningkatannya pada waktu itu mencapai 70% dari luas total areal tanam. Namun kecenderungan menanam tebu di kalangan petani tampaknya kini semakin menurun karena harga gula di tingkat lokal semakin rendah, terutama setelah “kran” impor gula dibuka pada tahun 1998. Disamping itu, sekarang banyak pabrik gula yang menanam tebu sendiri dengan cara menyewa tanah milik petani. Biasanya pabrik gula menyerahkan pengelolaan lahan tebu kepada koperasi karyawan pabrik gula.

Sejak pengesahan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang memberi kebebasan bagi petani untuk menanam jenis tanaman apa saja, penanaman tebu dan padi oleh petani juga cenderung tidak menentu. Sistem “*glebakan*” yang dahulu mewajibkan petani menanam 1/3 areal tanahnya untuk tanaman tebu sekarang tidak ada lagi. Petani tidak lagi wajib secara berkala menanam tebu. Jika mereka menanam tebu hal tersebut lebih ditentukan oleh alasan rasional, yaitu dari segi untung-rugi. Akibatnya, penanaman tebu umumnya banyak dilakukan oleh petani kaya yang memiliki lahan garapan luas.

Karena peluang kegiatan pertanian semakin terbuka, kini petani tidak terfokus hanya pada menanam padi tetapi juga menanam tanaman lain, terutama menanam jagung yang dinilai lebih menguntungkan karena dapat dipanen ketika masih muda (dipanen setelah berumur 2,5 bulan), untuk sayur, makanan ringan, atau dikirim ke pasar atau supermarket. Benih jagung untuk usahatani ini adalah merk Pioneer dari Malang, dapat dibeli di kios *saprodi* (sarana produksi pertanian) dengan harga Rp48.000 per 2,4 kg (Pioneer P11) atau Rp105.000 per 5 kg (Pioneer P7). Sedang benih jagung yang dipanen tua umumnya merk Bisi yang berasal dari Kediri dapat dibeli dengan harga sekitar Rp16.500 per 5 kg. Bagi para petani yang memilih menanam jagung, kecenderungan pola tanam mereka saat ini adalah menanam padi-padi-jagung, atau padi-jagung muda-jagung muda-jagung muda.

Biaya usahatani tanaman jagung muda sekitar Rp250-300 ribu *peratus*⁶ (lihat lampiran Tabel 5), terdiri dari biaya pengolahan tanah (*gawe, singkal*) sekitar Rp40.000, menggemburkan tanah (*nyangkul, dangir*) Rp25.000, menanam (*gejik*) Rp35.000, pembelian *saprodi* (pupuk urea sekitar 1 kuintal) Rp110.000, benih Rp30.000 dan obat pemberantas hama sekitar Rp40.000.

⁶ *Peratus* artinya per 100 *ru* atau 1/7 hektar. *Ru* adalah ukuran lokal yang luasnya sekitar 14 m². Satu hektar sawah luasnya sama dengan 700 *ru*.

Harga *tebasan* jagung muda lebih tinggi daripada harga jual jagung tua (untuk jagung pipil), meskipun jangka waktu penanamannya lebih pendek. Harga *tebasan* jagung muda sekitar Rp600-650 ribu *peratus*, bahkan kadang-kadang mencapai Rp800-900 ribu *peratus*. Sementara harga *tebasan* jagung tua hanya sekitar Rp550 ribu *peratus*. Hal ini karena jagung tua tidak lagi menjadi bahan makanan pokok, tetapi hanya sebagai bahan baku untuk pembuatan pakan ternak, misalnya: untuk pakan sapi perah, pakan ayam, pakan ikan, dan pakan burung.

Pada tahun 1984 kacang kedelai cukup banyak ditanam di desa ini, tetapi sekarang semakin sedikit, meskipun sebenarnya sejak beberapa tahun terakhir ini di Desa Mojosari banyak tumbuh industri pembuatan tempe dan tahu.⁷ Para pemilik industri tempe dan tahu umumnya lebih menyukai kedelai impor dari Amerika Serikat atau Cina yang bijinya besar dan harganya lebih murah. Jenis tanaman kedelai yang ditanam pada umumnya adalah jenis Wilis.

Berdasarkan catatan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) di Kecamatan Ngoro, selama periode April-September 2000 luas areal tanaman padi di Desa Mojosari hanya sekitar 171 ha, sementara areal tanaman jagung mencapai 139 ha dan tanaman kedelai 12 ha.

Kegiatan Ekonomi yang Menonjol Selain Usahatani

Jenis usaha lain yang juga cukup berkembang adalah usaha pembuatan bata merah. Bata merah dibuat di areal sawah tadah hujan atau di lahan sawah yang tanahnya tinggi dan tidak terjangkau oleh sistem pengairan yang ada, khususnya di musim kemarau. Pembuatan bata ini sekaligus juga sebagai upaya untuk menurunkan ketinggian tanah agar sawah dapat dilalui oleh air irigasi. Sawah disewakan kepada pembuat bata selama 1-2 tahun hingga penurunan permukaan sawah dianggap cukup. Hubungan antara pengrajin bata merah dengan pemilik sawah umumnya bersifat bagi hasil, yaitu pemilik sawah mendapat 12 berbanding 1 dari jumlah seluruh bata merah yang dihasilkan. Usaha pembuatan bata ini bersifat perorangan, mempekerjakan 1-2 orang pekerja dengan upah Rp15.000 per 1.000 bata mentah yang dihasilkan. Seorang pekerja mampu membuat sekitar 800-1.000 buah bata mentah per hari. Modal usaha pembuatan bata merah umumnya berasal dari *juragan* (pengusaha besar/pemilik modal) yang menampung bata merah yang dihasilkan. Jumlah pinjaman ini mencapai Rp 1 juta per pengrajin bata. Harga bata merah dalam jumlah besar Rp75.000 per 1.000 buah, sedang untuk konsumen akhir mencapai Rp90.000 per 1.000 buah. Pemasaran bata merah tidak terbatas untuk konsumsi lokal, tetapi juga ke wilayah lain, terutama ke daerah Lamongan yang jaraknya sekitar 100 km dari Jombang.

Dampak lain dari berkembangnya tanaman jagung muda adalah meluasnya usaha peternakan sapi. Sekitar 10 tahun yang lalu, di Desa Mojosari pernah dikembangkan peternakan *sapi perah* oleh pemerintah melalui program Banpres (Bantuan Presiden). Namun usaha ini tidak dapat berjalan dengan baik karena banyak peternak sapi mengalami kesulitan dalam memasarkan produk susunya, juga karena harga pakan ternak mahal. Akibatnya banyak petani merugi, dan akhirnya terpaksa menjual sapi

⁷ Menurut keterangan penduduk, industri tempe dan tahu mulai tumbuh setelah Desa Mojosari dikunjungi Harmoko, Menteri Penerangan pada masa itu.

perahnya. Petani kemudian beralih ke pemeliharaan ternak sapi potong, baik sapi jenis lokal maupun impor, seperti sapi Brahman, atau sapi jenis Limosin dari Australia. Sapi dibeli ketika masih kecil dan dijual setelah dipelihara 1-2 tahun. Harga seekor anak sapi betina jenis Limosin di pasar terdekat (Pasar Pon) mencapai Rp4,5 juta, sementara yang jantan Rp2,5 juta. Sapi jenis Brahman dewasa mencapai Rp8 juta. Usaha ini memberikan *margin* keuntungan yang cukup tinggi bagi petani, sehingga banyak ditiru oleh petani yang lain, baik yang memelihara sendiri maupun yang diserahkan kepada orang lain dengan cara bagi hasil. *Sistem bagi hasil* usaha ternak potong adalah harga jual dikurangi dengan harga pembelian awal dibagi dua.

Dampak positif usaha penggemukan ternak sapi adalah banyak petani dapat memanfaatkan kotoran sapi untuk memupuk tanaman sawahnya. Dengan demikian petani dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50%. Upaya ini sangat menunjang petani karena sejak Desember 1998 pemerintah sudah tidak lagi memberikan subsidi pupuk sehingga menyebabkan harga pupuk meningkat.

Beberapa penduduk desa juga mengembangkan peternakan ayam. Namun menurut penuturan penduduk setempat, meskipun memiliki potensi ekonomi, usaha peternakan ayam sering tidak disukai karena disamping menyebabkan banyak lalat juga menimbulkan gangguan bau. Akibatnya, penduduk setempat meminta agar peternakan ayam yang berlokasi di sekitar perumahan penduduk dipindah ke lokasi di luar perumahan penduduk.

II. PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

Pemilihan Benih

Benih padi dapat dibedakan dalam lima katagori, dari mutu yang tertinggi hingga mutu yang terendah, yaitu BS (*Basic Seed*), FS (*Foundation Seed*), SS (*Stock Seed*), ES (*Elementary Seed*), dan terakhir Bina. Sang Hyang Seri atau PT. Pertani memproduksi benih BS, dan dari benih BS ini dihasilkan benih FS. Penangkar atau pembibit menggunakan benih FS untuk menghasilkan benih SS, dan dari benih SS untuk menghasilkan benih ES. Hanya benih SS dan ES yang dipasarkan kepada petani. Petani di Desa Mojosari umumnya kini cenderung menggunakan benih SS. Hal ini berbeda dengan penggunaan tahun 1980an yang lebih banyak menggunakan benih Bina. Meskipun demikian diantara petani masih ada yang menggunakan benih hasil tanaman sendiri, terutama benih IR-64 (mulai diperkenalkan sejak tahun 1986) yang sekarang sudah jarang dijual di pasaran tetapi tetap diminati oleh petani.

Jenis-jenis varitas padi yang ditanam di wilayah Jombang saat ini adalah jenis IR-64, Widas, Digul, Memberamo, Wai Apu Buru, Sintanuriah dan Kalimas. Varitas Widas dan Digul menghasilkan produksi tinggi, tetapi nasinya keras, sehingga kurang disukai oleh petani. Memberano yang diperkenalkan sejak 1995 kurang diminati petani karena hasil panennya sering tidak merata, meskipun dari segi rasa cukup enak. Jenis Sintanuriah diperkenalkan pada tahun 2000. Namun pada saat di lapangan Tim Peneliti tidak menjumpai varitas Sintanuriah di Desa Mojosari. Jenis Way Apo Buru tingkat produksinya tinggi, tetapi persentase jumlah butir kuning dan *broken*-nya tinggi, sehingga sering ditolak oleh Dolog, serta kurang diminati oleh petani karena batang padinya mudah patah (bisa kehilangan sekitar 5%) serta rasanya kurang enak. Sedang padi jenis Kalimas, jenis varitas baru, dinilai memiliki beberapa keunggulan, antara lain tingkat produksinya tinggi, rasanya enak, dan tahan terhadap hama tungro, wereng dan sundep, meskipun masa tanamnya biasanya lebih panjang 5-7 hari dibanding dengan jenis IR-64. Varitas ini baik ditanam pada musim penghujan maupun musim kemarau sehingga disukai oleh petani. Varitas ini diperkirakan dapat menggantikan posisi IR-64 yang mulai rentan terhadap serangan hama.

Di Desa Mojosari, benih padi varitas Way Apo Buru, IR-64 dan Widas dijual dengan harga rata-rata Rp2.800 per kg. Di kios di kecamatan terdekat, benih varitas IR-64 dijual seharga Rp2.750-Rp2.900 per kg untuk kualitas SS dan Rp2.250 untuk kualitas ES, Widas Rp2.250 per kg (ES), Memberano Rp2.750-Rp3000 (SS) dan Rp2.500-2.750 (ES) serta Way Apo Buru Rp2.250 per kg (SS) dan Rp1.900 (ES). Di kota Jombang benih IR-64 dijual seharga Rp2.750-Rp3.000 (SS) dan Rp2.200 (ES) per kg. Kalimas, dijual seharga Rp3.000-Rp4.000 per kg. Harga benih di tingkat penangkar lebih murah, yaitu sekitar Rp2.200 per kg (lihat lampiran Tabel 6).

Menurut seorang penangkar benih dari Jombang, penanaman IR-64 di Jombang masih cukup tinggi, yaitu mencapai 70% dari luas areal tanam. Kesadaran petani di wilayah Jombang untuk menanam benih unggul cukup tinggi. Terbukti sebagian besar petani sudah menggunakan benih berlabel SS, sementara di wilayah Pasuruan ke arah timur banyak yang masih menggunakan benih dengan label ES. Namun, selain label, yang

juga dinilai penting oleh petani dalam memilih benih saat ini adalah nama dagang atau merk benih. Hal ini karena setelah era reformasi para penangkar benih dapat menjual dengan nama dagangnya sendiri, tanpa harus melalui Sang Hyang Seri atau PT. Pertani seperti pada era Orde Baru.⁸

Penggunaan benih oleh petani Desa Mojosari cukup tinggi, dan umumnya melebihi ketentuan. Dinas Pertanian merekomendasikan penggunaan benih 40 kg per ha, tetapi kenyataannya penggunaan benih oleh petani dapat mencapai 60-70 kg per ha. Banyak petani beranggapan bahwa dengan menggunakan lebih banyak benih, tunas tanaman yang akan tumbuh akan lebih banyak, sehingga produksi padi dapat meningkat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hasil panen tetap tidak meningkat selama kurun waktu 15 tahun terakhir ini, meskipun petani telah menggunakan benih padi dan pupuk melebihi dosis. Jadi anggapan para petani tersebut pada kenyataannya tidak selalu benar.

Persiapan Tanah

Sebagian besar petani di Desa Mojosari pada saat kunjungan ke dua telah menggunakan traktor untuk mempersiapkan tanah pertaniannya. Pada saat kunjungan pertama mekanisasi pertanian juga sudah mulai ada. Ongkos sewa traktor Rp25.000-Rp35.000 *peratus* atau Rp175.000-Rp245.000 per ha. Bila ditambah dengan biaya tenaga kerja, biaya persiapan lahan sawah mencapai Rp280.000 per ha. Banyak petani memilih menggunakan traktor karena lebih cepat dan biayanya lebih murah dibandingkan dengan jika menggunakan tenaga hewan sapi. Membajak lahan seluas satu hektar dengan traktor cukup dilakukan dalam satu hari. Sementara bila menggunakan tenaga hewan membutuhkan waktu hingga 7 hari bila menggunakan dua pasang sapi, atau 14 hari bila hanya menggunakan satu pasang sapi.

Biaya membajak sawah dengan tenaga sapi sekitar Rp17.500 per pasang sapi untuk setengah hari kerja. Untuk sawah 100 *ru* atau *peratus* dibutuhkan 2 hari kerja dengan 2 pasang sapi, sehingga biayanya mencapai Rp35.000 *peratus* atau Rp245.000 per ha. Biaya ini tidak termasuk biaya tenaga kerja satu orang selama dua hari dengan upah Rp10.000 per hari atau Rp20.000 *peratus*, atau Rp140.000 per ha.

Selain membajak sawah dengan traktor atau dengan tenaga hewan, sebagian petani juga melakukan pekerjaan meratakan dan merapikan sawah (*popok, tamping, gepruk*) yang membutuhkan biaya sekitar Rp250.000 per ha.

Saat ini, untuk menyiapkan lahan sawah para petani mulai memanfaatkan pupuk kandang (kotoran sapi) sebagai pupuk dasar. Pemupukan dengan pupuk kandang biasanya dilakukan di musim kemarau. Pada saat kunjungan pertama pada tahun 1985, penggunaan pupuk kandang masih terbatas untuk tanaman palawija.

⁸ Pada saat penelitian lapangan di Kabupaten Jombang tinggal sekitar 13 dari 32 penangkar benih yang ada sebelum krismon. Dulu belum ada penangkar dan semua benih padi berlabel dikeluarkan oleh Sang Hyang Seri.

Persiapan Pembibitan dan Penanaman

Persiapan pembibitan padi umumnya dimulai lebih awal, bahkan ada yang sudah mulai ketika padi belum dipanen. Petani biasanya menyediakan satu petak kecil tanah untuk tempat pembibitan. Setelah diolah, tanah untuk pembibitan tidak diberi pupuk kimia tetapi pupuk hijau atau pupuk kandang yang sudah lama dan telah menjadi kompos. Ada juga yang mencampur pupuk hijau atau pupuk kandang dengan pupuk urea. Setelah itu dilakukan penaburan benih. Masa pembenihan kurang lebih satu bulan. Dengan semakin intensifnya penanaman padi sebagai akibat dari adanya sarana pompa air bor sebagai pengganti sarana irigasi, maka sebagian petani telah melakukan pembenihan bahkan ketika tanaman padi belum dipanen. Sehingga masa penanaman dapat dilakukan lebih cepat. Untuk penanaman benih biasanya dibutuhkan 2-5 orang buruh tani laki-laki untuk sawah seluas 1 ha.

Penanaman bibit (*tandur*) biasanya dikerjakan oleh buruh tani perempuan, kecuali untuk mencabut bibit (*ndaut*) dari petak pembibitan yang selalu dikerjakan oleh buruh tani laki-laki. Pada tahun 1985 mereka umumnya bekerja sebagai buruh harian, tetapi setelah “krismon” atau krisis moneter sistem kerja secara borongan lebih dominan. Upah borongan *tandur* sekitar Rp40.000-50.000 *peratus*, sedang untuk *ndaut* Rp25.000 *peratus*.

Pemupukan

Pemupukan tanaman padi (*ngrabuk*) umumnya dilakukan tiga kali dalam satu masa tanam padi. Pertama, pemupukan dasar, biasanya dilakukan sendiri oleh petani pemilik sawah, kecuali petani yang memiliki garapan sawah luas. Pemupukan ini dilakukan setelah pekerjaan persiapan tanah selesai, sebelum bibit padi ditanam. Kedua, pemupukan pada saat tanaman padi berumur 20 hari, dan ketiga, pada saat berumur 40 hari. Pemupukan sawah umumnya dikerjakan oleh buruh tani laki-laki, meskipun ada kalanya juga dilakukan oleh buruh tani perempuan.

Kecuali petani yang juga memanfaatkan pupuk kandang, penggunaan pupuk kimia (*fertilizer*) sebagai sarana produksi pertanian padi oleh para petani di Desa Mojosari tergolong tinggi. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang merekomendasikan penggunaan pupuk urea 250 kg per ha.⁹ Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petani menggunakan pupuk urea melebihi dosis yang ditentukan. Penggunaan pupuk urea yang berlebihan tanpa masukan pupuk KCl yang memadai tanpa disadari dapat mendorong hama untuk menyerang tanaman karena batang padi yang tumbuh subur menjadi lebih lunak.¹⁰ Temuan lapangan menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kimia di kalangan petani di Desa Mojosari tertinggi mencapai 700 kg per ha (terdiri dari pupuk urea 300 kg, TSP/SP-36 100 kg dan ZA 300 kg). Meskipun demikian sebagian petani justru mengurangi penggunaan pupuk kimia karena ketiadaan biaya, dan umumnya hanya menggunakan urea dan TSP/SP36. Sementara

⁹ Rencana Pengembangan Pertanian Terpadu Dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Jombang, Nopember 2000.

¹⁰ *ibid.* Balai Pengkajian Teknologi dan Pertanian Kabupaten Jombang merekomendasikan penggunaan pupuk kimia berdasarkan kandungan isinya, yaitu: N sebanyak 135 kg, P₂O₅ 27 kg dan K₂O 30 kg per ha.

pada tahun 1985 penggunaan pupuk kimia hanya sekitar 400 kg per ha, terdiri dari 280 kg urea, 70-100 kg TSP, ditambah sejumlah kecil KCl.

Dengan adanya kebijakan penghapusan subsidi pupuk per 1 Desember 1998, harga pupuk meningkat. Di tingkat desa, harga pupuk urea mencapai Rp1.200 per kg, TSP Rp1.300 per kg, ZA Rp1.100 per kg dan KCl sekitar Rp 1.800 per kg. Menurut petani, harga pupuk yang tinggi ini dapat merugikan kegiatan usahatani, terutama apabila harga gabah rendah. Petani enggan mengurangi jumlah penggunaan pupuk karena takut hasil panennya akan merosot (lihat Kotak 1).

Kotak 1 **Keluhan Seorang Petani Mojosari**

Seorang petani di Desa Mojosari mengeluh tentang rendahnya harga gabah saat ini dibandingkan biaya menggarap sawah yang semakin mahal. Pada saat panen terakhir, harga jual tebasan tanaman padi hanya sekitar Rp3,5 juta per ha, padahal ia sudah mengeluarkan biaya besar selama menunggu 4 bulan sebelum gabahnya siap dijual. Ia menduga menurunnya harga gabah karena banyak beras impor beredar di pasaran.

Bagaimana bisa untung? Harga *saprodi* (sarana produksi pertanian) naik terus! Dalam satu bulan terakhir ini harga pupuk sudah naik 3 kali. Harga pestisida juga sangat mahal. Ia menduga harga dipermainkan oleh pedagang besar yang memiliki banyak uang.

Masalah yang dialami menjadi semakin berat karena sekarang banyak anak muda Desa Mojosari enggan bekerja di sawah sebab mereka dapat bekerja di pabrik atau di tempat kerja lainnya yang lebih menarik dengan gaji lumayan besar. Akibatnya, terjadi kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang menyebabkan upah tenaga kerja semakin tinggi. Seorang buruh tani laki-laki harus dibayar sekitar Rp10.000 sementara buruh perempuan Rp8.000 per hari, ditambah lagi dengan biaya makan, minum, dan rokok.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ia atau banyak petani lainnya enggan menanam padi, terutama di musim kemarau. Menanam padi hanya merupakan salah satu pilihan diantara kegiatan usahatani lainnya, terutama jika dibandingkan dengan menanam jagung muda dan tebu yang lebih menguntungkan. Sebagian petani menyewakan sawahnya ke pabrik gula dengan harga sewa sekitar Rp600 ribu per *peratus* per tahun. Selain itu, untuk mengurangi biaya produksi, sebagian petani beralih menggunakan '*tetes tebu*' atau *pupuk 'Amina'* (limbah pabrik Ajinomoto) sebagai pupuk, meskipun sebenarnya pemupukan dengan cara ini diduga dapat merusak tanah. Pemupukan dengan tetes tebu dulu hanya dilakukan pada tanaman tebu, tetapi sekarang juga pada tanaman padi. Bahkan untuk pemberantasan hama tanaman, ada petani yang menggunakan sabun *deterjen* atau *karbit* sebagai pengganti pestisida.

Ia hanya bisa berharap harga pupuk dapat turun, harga gabah bisa naik dan pemerintah melarang impor beras. Menurutnya, harga pupuk urea yang ideal harus setara dengan harga gabah GKP di tingkat desa pada saat panen - saat ini sekitar Rp900-Rp1.000 per kg.

Karena harga pupuk kimia semakin mahal, para petani mulai mengintensifkan kembali pemanfaatan pupuk kandang. Dulu pemupukan dengan pupuk kandang dilakukan setiap 3 tahun sekali, dan tidak oleh semua petani.¹¹ Penggunaan pupuk kandang lebih diutamakan pada tanaman palawija. Sekarang penggunaan pupuk kandang sebagai pupuk dasar untuk tanaman padi mencapai 1 ton *peratus* atau 3 truk setara dengan 7 ton, atau 21 truk per hektar. Pemupukan dilakukan setiap dua tahun sekali. Harga pupuk kandang pada saat kunjungan kedua sekitar Rp35.000-Rp55.000 per truk.

Menyiangi Tanaman

Pekerjaan menyiangi tanaman (*nglandak*) biasanya dilakukan satu atau dua kali dalam satu musim tanam. Pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh buruh tani perempuan dan dikerjakan sebelum pemupukan sawah. Rata-rata seorang buruh tani dapat menyelesaikan 100 *ru* dalam dua hari dengan upah kerja Rp8.000 per orang per hari. Sekarang pekerjaan *nglandak* kebanyakan dikerjakan secara borongan dengan upah Rp40.000 *peratus*. Setiap 100 *ru* sawah dikerjakan sekitar 10 orang buruh tani perempuan selama setengah hari kerja.

Pada musim kemarau, disamping menyiangi tanaman gulma, rumput-rumput yang tumbuh di sawah juga harus dicabut (*dadak*). Pekerjaan ini memakan biaya lebih besar karena lebih sulit dan lebih lama. Dalam kondisi tertentu, misalnya ketika kemarau panjang, pekerjaan *dadak* tidak cukup hanya dilakukan satu kali.¹²

Menyemprot Hama

Sejak krismon pada pertengahan tahun 1997 harga pestisida atau obat pemberantas hama melambung tinggi, akibatnya petani terpaksa mengurangi penggunaan pestisida. Penyemprotan hama hanya dilakukan setelah pemilik sawah melihat kondisi tanaman. Apabila kondisi tanaman bagus, petani tidak melakukan penyemprotan hama sesuai dengan anjuran Dinas Pertanian. Karena tidak mampu membeli pestisida, sebagian petani mulai mencari cara lain, seperti menggunakan *sabun deterjen*, *sabun cuci Wings*, atau *karbit*¹³ untuk menyemprot hama tanamannya. Penyemprotan atau pemberantasan hama tidak dilakukan serentak seperti kebiasaan para petani Desa Mojosari 15 tahun yang lalu. Meskipun demikian, kondisi tanaman padi ternyata cukup baik, dan hama tanaman tidak banyak dijumpai kecuali sebagian kecil sawah terkena hama *sundep*.

¹¹ Informasi tentang jumlah penggunaan pupuk kandang dan pupuk hijau untuk tanaman padi pada saat itu tidak diperoleh tim peneliti.

¹² Meskipun rumput juga dapat digunakan atau dijual untuk makanan ternak, hasil yang diperoleh tidak seimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan. Pada saat ini semakin banyak petani menanam jagung muda, karena itu para peternak lebih menyukai menggunakan daun jagung muda sebagai pakan ternak, apalagi harganya lebih murah.

¹³ *Karbit* adalah bahan bakar untuk mengelas besi dan logam.

Berbagai jenis pestisida yang digunakan di Desa Mojosari saat ini antara lain adalah Furadan, Arrivo, Baycart, Dursban dan Acodan. Pestisida merk Arrivo adalah pestisida yang paling laku di kalangan petani Desa Mojosari. Arrivo 30 Ec atau Baycart dijual dengan harga Rp28.000 per 500 ml, Furadan Rp14.500 per 2 kg, Dursban 20 Ec Rp30.000 per 500 ml, dan Acodan Rp9.000 per 100 cc (lihat lampiran Tabel 8).

Untuk mengatasi hama, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sedang mengembangkan sistem pertanian terpadu, yaitu melakukan pemberantasan hama dan pemupukan tanaman dengan menggunakan unsur-unsur alami. Misalnya, menggunakan kompos, pupuk kandang, dan tanaman azzola (*kataria*) untuk pemupukan, sedang untuk pemberantasan hama melalui mina padi¹⁴, memelihara bebek, serta menggunakan air bawang putih atau lada hitam untuk obat penyemprot hama tanaman sebagai pengganti pestisida.¹⁵ Namun penggunaan azzola dan pertanian mina padi tidak ditemui di Desa Mojosari karena sistem ini hanya cocok untuk areal sawah yang kelebihan air. Demikian pula penyemprotan hama dengan bahan alami belum ditemui di desa ini.

Mengairi Sawah

Pada tahun 1985 pengairan sawah pada umumnya mengandalkan air sungai, air sumber atau air hujan. Para petani dihimpun dalam kelompok-kelompok petani guna mengatur pengairan sawah, jadwal tanam atau untuk memperoleh kredit program. Di Desa Mojosari pengaturan pengairan sawah dilakukan oleh seorang Mata Ulu di tiap-tiap kampung yang memiliki sawah beririgasi. Petani dipungut iuran untuk biaya pengairan sawah. Setelah era krisis ekonomi dan reformasi, peran Mata Ulu semakin menyusut. Hal ini karena banyak saluran tersier yang rusak dan tidak diperbaiki, sehingga aliran air irigasi dari sungai ke saluran-saluran tersier di musim kemarau tidak jalan. Akibatnya, saluran irigasi hanya dapat digunakan di musim hujan. Saat ini Desa Mojosari tidak memiliki pengurus pengairan setelah terjadi penggantian pamong desa beberapa tahun yang lalu. Sejak itu penarikan uang iuran pengairan juga berhenti.

Selain itu, peranan Mata Ulu menurun karena penggunaan sumur bor semakin meluas. Selanjutnya karena banyak petani telah memanfaatkan sumur bor untuk mengairi sawahnya maka penanaman padi menjadi semakin intensif. Hal ini sudah berjalan lebih dari 7 tahun.¹⁶ Rata-rata tiap blok sawah memiliki beberapa sumur bor. Dalam satu blok sawah seluas kurang lebih 80 ha dapat ditemui sekitar 12 sumur bor.

¹⁴ Mina padi adalah menanam padi sekaligus memelihara ikan di sawah, misalnya ikan Mujahir, Nila, Tawes, dsb)

¹⁵ Pendekatan lain adalah dengan menggunakan pendekatan LEISA (*Low External Input Sustainable Agriculture*) dan *zero waste*. Namun pendekatan ini masih dalam konsep dan belum diterapkan di daerah ini. (Rencana Pengembangan Pertanian Terpadu Dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Jombang, Nopember 2000).

¹⁶ Pompa air untuk pengairan sawah mulai digunakan sejak tahun 1995 melalui proyek kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan P2AT (Proyek Penggunaan Air Tanah).

Sumur bor ini menggunakan pompa diesel yang disewa dari pemilik diesel dengan ongkos Rp3.000 per jam. Bila pengairan sawah tidak dilakukan sendiri oleh petani maka biaya tenaga kerja untuk mengairi sawah dengan sumur bor Rp15.000 per malam. Dalam satu musim tanam padi – terutama pada musim kemarau – kegiatan mengairi sawah dengan sumur bor dilakukan 3-4 kali, masing-masing selama 5-10 jam. Dengan cara ini produksi padi pada musim kemarau tetap dapat dipertahankan, bahkan seringkali justru meningkat.

Pada saat kunjungan kedua dilakukan, belum diketahui apakah sumur bor yang digunakan untuk mengairi sawah telah mempengaruhi ketersediaan air untuk rumah tangga mengingat jarak lahan persawahan dengan perumahan tidak terlalu jauh.

Biaya Usahatani

Komponen biaya usahatani meliputi biaya untuk upah buruh, pembelian sarana produksi (*saprodi*), serta biaya-biaya lain, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), sewa tanah, ongkos angkut, dsb. Biaya tenaga kerja meliputi biaya untuk kegiatan persiapan tanah (mencangkul dan membajak), pembibitan, menanam, menyiangi, memupuk, menyemprot hama, dan mengairi sawah. Dua tabel berikut memberikan gambaran besaran biaya usahatani, yaitu biaya tenaga kerja dan *saprodi*.

Tabel 3. Tenaga Kerja dan Biaya Tenaga Kerja Usaha Pertanian Padi Sawah per Hektar, Tahun 2001

Rincian	Volume		L/P	Harga satuan *)	Total biaya per ha (Rp)	
	Bawah	Atas			Bawah	Atas
Mencangkul - popok, tamping, gepruk	2 x 7	5 x 5	L	10.000	140.000	250.000
Membajak - sewa traktor **)	-	per ha	L	280.000	-	280.000
- bajak sapi	peratus	-		17.500	245.000	-
Pembibitan - membuat bibit		5 x 1	L	10.000	100.000	50.000
- memelihara		1 x 8		10.000	-	80.000
- mencabut (ndaut)	peratus	peratus		25.000	175.000	175.000
Menanam (tandur)	peratus	Peratus	P	35.000	245.000	245.000
Memupuk - Pupuk dasar	1 x 3	1 x 1	L/P	10.000	30.000	10.000
- Pemupukan I	1 x 3	1 x 1			30.000	10.000
- Pemupukan II	1 x 3	1 x 1			30.000	10.000
Menyiangi - nglandak	peratus	7 x 2	L/P	40.000	280.000	140.000
- dadak ***)	peratus	25 x 4	P	40.000	560.000	850.000
Menyemprot hama	2 x 5	3 x 5	L	10.000	100.000	150.000
Mengairi: ***) - tenaga kerja	2 x 4	2 x 4	L	15.000	120.000	120.000
- sewa diesel **)	2x4x10			3.000	240.000	240.000
Panen	tebasan	Tebasan	L	x	x	x
Total					2.295.000	2.610.000

Keterangan: *) Biaya tenaga kerja laki-laki Rp10.000 dan perempuan Rp.8500 per orang/hari, sudah termasuk biaya makan, rokok, dan lain lain.

**) Dengan asumsi pemilik diesel/traktor juga dianggap menyewa.

***) Hanya dibutuhkan ketika musim kemarau.

Sumber: Data lapangan, tahun 2001

Dua tabel tersebut menunjukkan tingginya biaya usahatani padi di Desa Mojosari di hampir semua komponen usahatani. Misalnya biaya untuk membeli benih, pupuk kimia, atau untuk tenaga kerja. Dua jenis kegiatan yang ada dalam kegiatan usahatani di Desa Mojosari tetapi tidak ada dalam komponen biaya usahatani di Jawa Timur adalah biaya untuk pencabutan gulma dan rumput (*dadak*) serta biaya untuk pengairan sawah. Kedua jenis kegiatan ini hanya dilakukan petani di musim kemarau ketika sawah-sawah kekurangan air dan sawah banyak ditumbuhi gulma dan rumput. Jika kedua komponen biaya ini dikeluarkan, maka jumlah biaya usahatani padi di Desa Mojosari berkisar antara Rp2-Rp2,5 juta per musim per hektar, belum termasuk untuk biaya sewa tanah dan pajak tanah. Besar biaya ini tetap lebih tinggi dibanding biaya rata-rata usahatani padi di Jawa Timur pada tahun 2001.

Tabel 4. Biaya Sapropdi Usaha Pertanian Padi Sawah per Hektar Tahun 2001

Rincian	Volume		Harga satuan	Total biaya per ha (Rp)	
	Bawah	Atas		Bawah	Atas
<i>Bibit (kg)</i>	60	70	3.000	180.000	210.000
<i>Obat hama (kemasan botol)</i>	-	2	30.000	-	60.000
- Arrivo (500 cc)	2	-	15.000	30.000	-
- Dursban (500 ml)	-	2	10.000	-	20.000
- Furadan (kg)	-	-	-	-	-
<i>Pupuk (kg)</i>					
- Urea	100	300	1.050	105.000	315.000
- TSP/SP36	50	100	1.000	50.000	100.000
- KCl	-	-	1.700	-	-
- ZA	150	300	840	126.000	252.000
- Pupuk kandang *)	6300	-	150	135.000	-
Total				626.000	957.000

Sumber: Data lapangan, tahun 2001.

Pada tahun 1985, karena skala ekonominya maka biaya usahatani per hektar dari golongan petani kecil menjadi lebih tinggi daripada golongan petani besar. Sebagai gambaran, petani kecil mengeluarkan biaya tenaga kerja rata-rata Rp206.550 per ha, sedang untuk petani dengan lahan yang luas sekitar Rp161.950 per ha. Namun pada tahun 2001, biaya usahatani per hektar dari golongan petani kecil ini ternyata lebih rendah dibandingkan petani besar. Selain karena petani kecil berupaya keras menekan biaya, seperti mengganti pupuk, petani besar cenderung tetap melaksanakan aturan teknis Dinas Pertanian, termasuk dosis anjuran, dengan konsekuensi biaya lebih tinggi. Sebagai gambaran, seorang petani kecil mengeluarkan biaya usahatani rata-rata sekitar Rp300-Rp400 ribu *peratus*, sedang seorang petani besar Rp400-Rp500 ribu *peratus*. Biaya tersebut termasuk untuk biaya pembelian *sapropdi* (bibit, pupuk, pestisida) dan tenaga kerja, tetapi belum termasuk biaya sewa tanah, pajak, dll.

Bagi petani kecil yang harus menyewa lahan, maka ia harus juga mengeluarkan biaya lain. Bagi petani besar, selain ia harus membayar pajak tanah, dengan semakin meningkatkan biaya usahatani tanpa diimbangi harga gabah yang memadai, pilihannya adalah berusahatani padi sendiri atau menyewakan lahannya. Pada saat kunjungan kedua, harga sewa lahan sawah sekitar Rp500-Rp600 ribu *peratus* atau sekitar Rp3,5-Rp4,2 juta per tahun, sementara jika disewa oleh pabrik tebu (untuk tanaman tebu) mencapai Rp900 ribu *peratus* atau Rp4,5 juta per ha untuk jangka waktu selama 15 bulan. Sedang besarnya pembayaran pajak sekitar Rp150.000 per tahun per ha.

Sumber Modal Usahatani

Selain biaya usahatani meningkat yang tidak diimbangi dengan harga gabah yang memadai, kesulitan petani bertambah karena langkanya modal dan sumber modal yang dapat dipinjam. Pada kunjungan pertama tahun 1985, program Bimas mulai digalakkan dimana petani dapat memperoleh pinjaman kredit mudah sehingga memperlancar kegiatan usahatani mereka. Namun pada kunjungan kedua di tahun 2001 program kredit untuk usahatani sedang berjalan “seret” akibat besarnya tunggakan kredit KUT. Meskipun, pada tahun 2000 pemerintah pernah berjanji akan melakukan pemutihan terhadap pinjaman kredit KUT namun tidak jadi dilaksanakan.¹⁷

Kesulitan memperoleh modal produksi menyebabkan sebagian petani tidak mampu lagi melakukan kegiatan usahatani sesuai dengan aturan teknis yang disarankan Dinas Pertanian guna memperoleh hasil optimal. Sebagai contoh, kebanyakan petani kecil terpaksa mengurangi jumlah masukan pupuk karena harga pupuk semakin mahal; penyemprotan hama hanya dilakukan kalau tanaman terserang hama penyakit.

¹⁷ Menurut petani, Presiden Abdurrahman Wahid pernah berjanji akan memutihkan semua pinjaman kredit KUT. Namun karena tidak lama kemudian ia berhenti sebagai Presiden, penghapusan pinjaman kredit KUT oleh para petani tidak terjadi.

III. PANEN DAN PASCA PANEN

Pilihan Sistem Panen

Ketika peneliti melakukan kunjungan pertama pada tahun 1985, di Desa Mojosari dikenal tiga macam sistem panen padi. *Pertama*, sistem *bawon*, dimana setiap orang dapat ikut bekerja memanen dan memperoleh bagian dalam jumlah tertentu, biasanya sekitar sepersepuluh dari jumlah hasil panen yang diperoleh. *Kedua*, sistem *kedokan*. Sistem ini ditemui di lingkungan masyarakat yang masih mempunyai hubungan kekerabatannya yang tinggi atau karena ada hubungan kerja antara pemilik dengan penyewa tanah.¹⁸ Dalam sistem ini hanya para pekerja yang sudah ikut bekerja di sawah yang dibolehkan ikut memanen. Mereka memperoleh bagian gabah yang jumlahnya relatif lebih besar daripada dengan menggunakan sistem *bawon*. *Ketiga*, sistem *tebasan*, yaitu bila panen dilakukan oleh pekerja *penebas* yang diupah. Pada tahun 1985 sistem *tebasan* hanya dibolehkan bagi penduduk desa setempat saja. Orang dari luar desa hanya diperbolehkan melakukan *tebasan* pada tanaman tebu atau palawija. Pada saat kunjungan kedua sistem *tebasan* dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh penduduk setempat maupun penduduk dari luar desa.

Pada kunjungan kedua, sistem *tebasan* lebih dominan. Sistem *kedokan* dan *bawon* saat ini sudah semakin jarang ditemui bahkan nyaris tidak ada antara lain karena hubungan kekerabatan juga semakin longgar. Saat ini sekitar 70-80% dari luas areal tanam di wilayah ini dipanen dengan sistem *tebasan*.

Dengan sistem *tebasan* petani pemilik sawah tidak lagi harus memanen sawahnya sendiri. Kini peran pemilik sawah telah diambil alih oleh para *penebas*. Sistem *tebasan* memungkinkan petani dapat langsung menerima uang sesuai dengan harga yang disepakati. Para *penebas* biasanya mempunyai beberapa buruh tani sendiri, biasanya buruh laki-laki yang dibayar harian.

Tenaga Kerja Panen dan Pasca Panen

Dengan semakin hilangnya sistem *bawon* dan *kedokan*, maka pekerjaan petani sebagai buruh tani pada waktu panen dan pasca panen juga semakin berkurang. Demikian pula *ngasak* atau mencari sisa-sisa padi di sawah sehabis dipanen yang dahulu banyak dilakukan oleh penduduk miskin berpenghasilan rendah di desa diperkirakan semakin berkurang, sampai kemudian petugas perontok padi dalam sistem *tebasan* membantu para *pengasak*.

Dalam sistem *tebasan*, padi umumnya dipanen oleh buruh tani laki-laki, dengan menggunakan *arit*. Setelah itu dilakukan perontokan padi dengan *mesin perontok padi*, untuk memisahkan bulir padi dari tangkainya. Pada kunjungan pertama tahun 1985 kebanyakan kegiatan perontokan padi dilakukan dengan cara *menggeblok* dan *tampen*.

¹⁸ Pada saat kunjungan pertama banyak orang kaya menyewa sawah dari petani kecil pemilik sawah, kemudian si pemilik sawah bekerja di sawahnya sendiri sebagai buruh.

Kini kedua cara itu tidak ada lagi, kecuali di rumah-rumah petani.¹⁹ Pada saat perontokan padi ini banyak perempuan menunggu di sekitar mesin perontokan padi mengumpulkan bulir-bulir padi (*ngasak*) yang masih tersisa setelah dirontokkan dari batangnya. Petugas perontok padi akan mendistribusikan sisa hasil perontokan padi secara merata. Mereka kemudian memisahkan sisa-sisa padi dari batang padi yang telah dirontokkan tersebut. Dengan cara ini, mereka dapat mengumpulkan sekitar 10-25 kg padi per musim panen, tergantung pada luas sawah yang dipanen dan banyaknya orang yang *mengasak*. Para pengasak ini biasanya mengikuti kemana saja *penebas* dan mesin perontok padi beroperasi. Siapa saja, baik warga desa maupun dari luar desa dapat ikut sebagai *pengasak*.²⁰

Pekerjaan setelah panen seperti pengangkutan dan penjemuran (*mepe*) sekarang juga dilakukan oleh buruh para *penebas*. Biasanya *penebas* menyewa atau meminjam truk dari pemilik *huller* untuk mengangkut hasil padi ke pabrik penggilingan padi langganannya. Mengangkut padi dengan pedati yang ditarik sapi (*cikar*) sekarang sudah tidak populer lagi. Untuk efisiensi waktu dan biaya kini petani menggunakan alat transportasi truk atau *colt*.²¹

Dengan sistem *tebasan*, petani menjual seluruh hasil panennya, tetapi biasanya menyisakan sebagian kecil sawah (sekitar 100 ru) yang siap panen untuk cadangan kebutuhan konsumsinya sehari-hari. Kebutuhan terhadap buruh tani atau pekerja pada masa pasca panen rendah, karena panen padi dikerjakan oleh petani dan keluarganya sendiri, termasuk pekerjaan untuk mengangkut dan menjemur (*mepe*) padi sebelum disimpan atau diproses menjadi beras. Bila akhirnya terpaksa menggunakan tenaga kerja, jumlahnya tidak banyak.

Apalagi saat ini, dengan adanya mesin *selep* keliling, petani dapat *menyelepkan* padinya tanpa harus membawa gabahnya ke tempat penggilingan padi, karena semuanya dapat dikerjakan di rumah petani sendiri, dan pengerjaannya ditangani langsung oleh pekerja *selep* yang datang ke rumah mereka. Keuntungan lain dari cara ini adalah selain biayanya murah, yaitu sekitar 1/13 dari hasil beras giling, *katul*, *menir* dan *sekam*, tetap menjadi milik petani.²² Operator *selep* keliling umumnya terdiri dari 3 orang, dan daerah operasinya mencakup satu wilayah kecamatan atau lebih. Mesin *selep* terdiri dari mesin pengupas kulit (yang menghasilkan buangan berupa *sekam*) dan mesin *poles* yang menghasilkan butir-butir beras yang sudah terpisah dari *katul*

¹⁹ *Menggeblok* adalah memukul-mukulkan bulir/batang padi ke tanah agar gabah terlepas dari tangkainya. Sebelumnya, di banyak desa di Jawa para petani *mengiles* padi, yaitu *menginjak-injak* bulir padi dengan kaki, agar gabah terlepas dari tangkainya. *Tampen* adalah membersihkan gabah dengan menggunakan alat penapis yang terbuat dari bambu (*tampah*). Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh tenaga perempuan. Sekarang pembersihan gabah dilakukan dengan sistem pengipasan yang menggunakan mesin (*huller*).

²⁰ Perontokan padi sengaja tidak dilakukan hingga semua padi terlepas dari tangkainya, sehingga memungkinkan para pengasak untuk mendapat hasil lumayan. Ini adalah salah satu bentuk solidaritas sosial dari mereka yang lebih mampu terhadap orang miskin di desa.

²¹ *Colt* adalah kendaraan angkut roda empat dengan bak terbuka, biasanya digunakan untuk angkutan perdesaan.

²² *Katul* dan *menir* untuk *pakan* (makanan) ayam, sedang *sekam* untuk bahan bakar, terutama untuk pembuatan bata merah. Sisa pembakaran *sekam* dapat digunakan sebagai *abu gosok* untuk mencuci piring.

dan *menirnya*. Para pekerja *selep* menerima upah sekitar 20% dari hasil yang diperoleh setiap hari.

Dengan demikian, mereka yang sekarang banyak menggunakan tenaga buruh tani pasca panen adalah para *penebas*. Para *penebas* mempekerjakan buruh untuk memanen padi, merontokkan padi, mengangkat padi ke dalam truk, menjemur, mengawasi *penyelepan*, mengepak gabah atau beras ke dalam karung, dan menangani pengangkutan gabah atau beras ke Dolog, toko-toko atau pasar yang menjadi langganannya.

Perubahan pola kerja pasca panen menyebabkan sistem pertanian di Desa Mojosari menjadi sangat intensif. Petani dapat segera langsung menggarap sawahnya untuk penanaman berikutnya, oleh karena itu tidak mengherankan apabila di wilayah ini dalam satu tahun para petani dapat menanam padi atau palawija 3 sampai 4 kali.

Tingkat Produksi

Seperti halnya pada tahun 1985, sulit menentukan secara tepat hasil panen per hektar, karena disamping tidak memiliki timbangan untuk mengukur jumlah produksi, juga karena sistem *tebasan* semakin meluas. Tingkat produksi dapat diperkirakan dari standar kualitas *tebasan* yang diberikan oleh *penebas*. Panen kualitas utama, adalah hasil panen oleh *penebas* sekitar 8,5-9 kuintal GKP *peratus* atau sekitar 6 ton per ha; panen kualitas sedang dengan hasil panen sekitar 7 kuintal *peratus* atau sekitar 5 ton per ha; sementara panen kualitas kurang (rendah) dengan hasil panen 5,5-6 kuintal *peratus* atau sekitar 4 ton per ha.

Berdasarkan data Jawa Timur Dalam Angka, hasil panen padi tahun 2001 di wilayah Kabupaten Jombang rata-rata hanya 5,2 ton per ha. Produksi pada kunjungan kedua ini lebih rendah dibanding dengan produksi pada saat kunjungan pertama yang mencapai 5,7 ton per ha (1984).

Ditinjau dari jenis varietas padi yang ditanam, seperti diuraikan pada bab sebelumnya, jenis varietas padi yang ditanam saat ini jauh berbeda dengan yang ditanam pada tahun 1985. Pada masa itu, varietas padi yang banyak ditanam adalah jenis Cisadane dan Krueng Aceh. Varietas Krueng Aceh memberikan hasil panen yang terbaik, sedang saat ini varietas yang menghasilkan produksi paling tinggi adalah IR-64 dan Kalimas. Varietas lain seperti Way Apo Buru, Memberano, Widas, dan Digul yang juga ditanam petani dinilai masih memiliki beberapa kelemahan, terutama untuk penjualan ke Dolog.

Dari segi kualitas gabah, Bulog menetapkan tiga macam kualitas gabah berdasarkan tingkat kekeringannya. Macam kualitas gabah pada kunjungan kedua ini hampir sama dengan kunjungan di tahun 1985. Hanya dalam hal penyebutannya saja yang agak berbeda, yaitu istilah "*kering lumbung*" telah diganti menjadi "*kering simpan*". Penggantian istilah dilakukan karena penjualan padi secara *tebasan* semakin meluas, sehingga kini hanya tinggal sedikit petani yang masih mempunyai lumbung padi sendiri. Kalaupun ada yang masih menyimpan gabah, gabahnya tidak lagi disimpan di lumbung seperti kebiasaan petani pada waktu dahulu, tetapi disimpan dalam karung-karung yang kemudian dionggokkan di sisi dinding rumah. Dengan demikian,

tingkatan kualitas padi sekarang adalah: *gabah kering panen* (GKP), *gabah kering simpan* (KPS) dan *gabah kering giling* (GKG) (lihat Tabel 5). Harga dasar gabah pada tahun 2001 untuk GKG adalah Rp1.519 per kg, gabah GKS Rp1.285 per kg dan gabah GKP Rp1.095 per kg. Menurut Bulog, persyaratan kualitas gabah sekarang sudah lebih ditingkatkan dibanding dahulu.

Tabel 5. Persyaratan Kualitas Gabah Pada Pembelian Kontraktor dan Satgas dari Petani Tahun 2001

No	Persyaratan Kualitas		GKG	GKS	GKP
1	Kadar Air	maks	14%	18%	35%
2	Butir Hampa/Kotoran	maks	3%	6%	10%
3	Butir Kuning/Rusak	maks	3%	3%	3%
4	Butir Hijau/Mengapur	maks	5%	7%	10%
5	Butir Merah	maks	3%	3%	3%

Keterangan: maks = maksimal kandungan.

Sumber: Lampiran Keputusan Bersama Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dan Bulog, 26 Pebruai 2001.

IV. PEMASARAN

Seperti yang ditemui pada saat kunjungan pertama pada tahun 1985, pemasaran padi dan beras di Desa Mojosari sangat dipengaruhi oleh jaringan perdagangan padi di tingkat lokal. Jaringan ini menempatkan Dolog sebagai tujuan utama pemasaran gabah dalam rangka pengadaan *stock* pangan nasional. Oleh karena itu, pemasaran padi dan gabah di tingkat lokal sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dalam penetapan harga dasar (*floor price*), ketersediaan *stock* gabah di tingkat petani (musim panen), daya tampung gudang-gudang Dolog, serta kebijakan Dolog/Bulog dalam pengadaan beras (lihat Kotak 2).

Kotak 2.

Kebijakan Bulog dalam Pengadaan Gabah

Saat ini Bulog menerapkan kebijakan baru yang juga dilaksanakan oleh Dolog di wilayah Jombang yaitu membeli dalam bentuk gabah dan bukan beras. Bulog menilai bahwa penyerapan dalam bentuk gabah lebih baik, daripada beras. Beberapa faktor yang menguntungkan antara lain: (i) kecepatan pengadaan; (ii) pedagang dan penggilingan padi dapat membeli gabah untuk pengadaan gabah ke Dolog, maupun untuk diolah menjadi beras dan dipasarkan ke pasar bebas; (iii) meningkatkan pelayanan kepada konsumen karena konsumen dapat memperoleh beras segar; (iv) mempercepat proses terjadinya *capital inflow* di pedesaan karena terdapat dana segar (*cash money*) di desa, sehingga dapat menciptakan dampak ganda (*multiplier effect*) terhadap kegiatan ekonomi di daerah; (v) merangsang timbulnya usaha peningkatan kualitas produk di pedesaan, seperti dalam proses pengeringan gabah, kualitas beras hasil *selep*, dsb. Dengan cara ini diharapkan tingkat kualitas gabah dan harga di tingkat petani semakin baik. Misalnya tingkat *broken* gabah dahulu sekitar 30%, tetapi secara berangsur-angsur sekarang diturunkan menjadi sekitar 20%.

Fungsi Bulog/Dolog lebih sebagai penyangga agar harga gabah di tingkat petani tidak jatuh serta merangsang pedagang untuk membeli padi. Idealnya semakin banyak pihak yang membeli gabah maka harga gabah di tingkat petani dapat terangkat. Berdasarkan perhitungan Bulog, biaya usahatani di Indonesia rata-rata sekitar Rp728 per kg GKP. Harga pasar gabah pada bulan Maret 2001 sekitar Rp1.110 per kg, tetapi menurun menjadi Rp1.076 per kg pada bulan Mei karena sedang berlangsungnya panen raya dengan jumlah produksi diperkirakan mencapai 1,9 juta ton gabah. Disamping itu juga masalah kapasitas pasar dan kemungkinan masih adanya *stock* gabah/beras lama yang tersimpan di pedagang/petani. Bulog tidak dapat memperkirakan berapa besar gabah atau beras yang masih tersimpan di petani.

Selaras dengan kebijakan baru tersebut, kebijakan dan manajemen pembelian gabah yang dilakukan di daerah sejak tahun 2000 diatur oleh Dolog, termasuk waktu pembelian dan jumlahnya. Pada dasarnya Bulog tidak menentukan jadwal tertentu untuk pembelian gabah, pelaksanaan pembelian gabah diserahkan sepenuhnya kepada Dolog. Informasi lapangan yang menunjukkan Dolog di wilayah Jombang menghentikan pembelian gabah dari petani per bulan Maret 2001, merupakan kebijakan lokal. Hal ini mungkin terjadi karena keterbatasan kapasitas gudang.

Sejak awal Januari 2001 Bulog/Dolog menerjunkan *Satgas* (Satuan Tugas) untuk ikut membeli gabah dari petani, dengan maksud untuk memperbanyak titik-titik penyerapan gabah di tingkat petani. Dengan demikian apabila pedagang tidak melakukan pembelian gabah, maka *Satgas* dapat melakukan pembelian langsung ke petani agar harga gabah tidak jatuh. *Satgas* ini sebenarnya sudah lama ada, hanya sekarang fungsinya ditingkatkan. Kantor *Satgas* berada di tiap-tiap Gudang Dolog atau Kantor Sub Dolog di daerah.

Pada tahun 1985, pemasokan beras ke Dolog harus melalui KUD, sehingga dikenal adanya harga pada tingkat KUD, non-KUD, dan Dolog. Sekarang kebijakan ini sudah dihapus. Pemasokan beras ke Dolog dapat langsung dilakukan oleh siapa saja yang terikat kontrak dengan Dolog, baik dari perusahaan, koperasi, atau individu, tanpa harus melalui KUD. Kebijakan yang positif dalam rangka mengurangi inefisiensi ini ternyata cukup memukul KUD. Sejumlah KUD di sekitar Desa Mojosari hampir bangkrut dan tidak mampu lagi untuk menjadi pemasok Dolog karena tidak mempunyai cukup modal, disamping kemampuan mengelola koperasi yang juga terbatas.²³

Selama periode 1970-1986 Dolog menerima pasokan dalam bentuk beras, tetapi pada tahun 1987-1999 sistem tersebut diubah, yaitu Dolog menerima pasokan dalam bentuk gabah. Pada waktu pemerintahan Presiden Habibie kebijakan tersebut diubah lagi, yaitu Dolog kembali menerima pasokan dalam bentuk beras.²⁴ Selama masa Pemerintahan Habibie yang singkat itu Dolog pernah membatalkan pembelian beras karena tidak mempunyai dana. Mulai tahun 2000 kebijakan pengadaan beras ke Dolog dikembalikan ke dalam bentuk beras, tetapi penyerahan sementara ke gudang Dolog harus dalam bentuk gabah. Pemegang kontrak berkewajiban memproses gabah menjadi beras sesuai dengan jadwal giling yang diminta oleh Dolog. Beras yang dihasilkan harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Dolog. Kandungan beras yang ditetapkan oleh Dolog adalah 63 kg beras untuk setiap kuintal gabah GKG yang disetor. Hasil giling yang melebihi ketentuan di atas dianggap sebagai biaya giling, termasuk juga hasil *katul*, *menir* dan *sekamnya*.²⁵ Sementara apabila hasil gilingnya berada di bawah angka tersebut, maka kerugian yang timbul adalah resiko dan menjadi tanggung jawab kontraktor.

Di Desa Mojosari, mata rantai pemasaran padi di tingkat lokal dimulai dari tingkat *penebas* atau *bakul* yang membeli padi dari petani sebelum dipanen (biasanya sekitar dua minggu sebelum dipanen). Sebagian petani masih menyimpan gabah, tetapi biasanya hanya untuk kebutuhan sendiri, dan kalau pun ada yang dijual umumnya dijual ke pasar-pasar atau warung-warung terdekat dalam bentuk beras. Oleh karena itu peran *loper* dan *nguyang* (pembeli gabah dalam jumlah sedikit, hanya beberapa karung) ke rumah-rumah petani yang pada kunjungan tahun 1985 ditemui, sekarang hampir hilang.

Penebas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (i) *penebas kecil* atau merupakan *bakul* memproses sendiri perolehan padinya, untuk selanjutnya dijual dalam bentuk beras ke pasar-pasar atau toko-toko yang menjadi langganannya; dan (ii) *penebas besar*, yang umumnya terikat dengan pengusaha *selep* besar yang menjadi pemasok Dolog dalam pengadaan stok pangan nasional. Semua hasil *tebasan* para *penebas* besar diserap oleh pengusaha *selep*. Namun *penebas* umumnya masih dibolehkan menjual beras atau gabah ke tempat lain apabila harga di tempat lain lebih bagus (lihat Kotak 3). Seorang *penebas* dapat memperoleh pinjaman modal kerja dari pemasok beras Dolog

²³ Sekarang KUD di sini hanya melayani simpan-pinjam untuk anggotanya sendiri, mengurus pembayaran listrik, serta menyewakan *huller* kepada para *bakul* atau *penebas* yang membutuhkan.

²⁴ Selama masa pemerintahan Presiden Habibie.

²⁵ Di Gudang Dolog, gabah dari masing-masing kontraktor dipisahkan dan diberi label, sehingga tidak tertukar ketika kontraktor harus memproses gabahnya menjadi beras.

antara Rp5– Rp30 juta, tergantung dari besarnya skala usaha *penebas* dan pengusaha *penggilingan padi*. Pembayaran pinjaman biasanya diperhitungkan menurut volume gabah yang disetorkan.

Kotak 3. Profil Dua Pedagang Gabah

Pak Saman (*bukan nama sebenarnya*), *penebas* dari Desa Mojosari

Pak Saman, sejak lulus SD sudah berdagang gabah. Mula-mula ia hanya “*nguyang*” di desanya sendiri, dengan membeli 1-2 karung padi per hari yang diangkut dengan sepeda. Sekarang ia sudah menjadi seorang *penebas* besar yang menginduk pada Pak Hanto (*bukan nama sebenarnya*), pengusaha besar beras pemilik penggilingan beras di Pare, ibukota kecamatan. Pada saat tim peneliti sedang berada di desa, Pak Saman sedang menganggur karena musim *tebasan* sudah berakhir. Hari *tebasan* terakhir adalah tanggal 20 Maret 2001, dan setelah tanggal 25 Maret Dolog tidak akan menerima setoran gabah. Ia belum tahu kapan *tebasan* berikutnya, karena harus menunggu perintah dari “*boss*”nya di Pare.

Harga *tebasan* tahun ini turun dibanding tahun-tahun sebelumnya, hanya sekitar Rp500–Rp600 ribu per *peratus*. Ia pernah menebas padi seharga Rp700.000 *peratus* tetapi ternyata ia merugi, sehingga harga *tebasan* akhirnya diturunkan.

Wilayah *tebasan* – Pak Saman meliputi daerah Ngawi, Sragen, Nganjuk dan Jombang. Panen pertama biasanya di daerah Sragen, sekitar bulan Januari. Panen di Nganjuk bulan Pebruari, Ngawi bulan Pebruari/Maret, dan terakhir Jombang sekitar bulan Maret. Ia menjual gabahnya ke Pak Hanto di Pare dengan harga sekitar Rp1.220–Rp1.240 per kg (GKG) atau sekitar Rp1.825–Rp1.950 per kg jika dalam bentuk beras.

Pak Hanto (*bukan nama sebenarnya*), “*boss*” beras di Pare

Pak Hanto adalah seorang pedagang besar beras yang sekaligus juga sebagai pemasok Dolog. Ia mempunyai dua penggilingan padi, lengkap dengan tempat penjemuran padi dan gudang besar. Pada tahun 2000, ketika Dolog tidak membeli beras lagi, Pak Hanto masih memiliki satu gudang penuh berisi beras. Terpaksa sebagian dari berasnya dipasarkan ke pasar umum dengan harga jauh lebih rendah. Harga pembelian beras oleh Dolog pada waktu itu Rp2.250 per kg, tetapi Pak Hanto menjual berasnya hanya dengan harga Rp1.950 per kg.

Selain menjual gabah ke Dolog di Kediri, Pak Hanto juga menjual sebagian dari berasnya ke pasar lokal di Pare, tetapi harganya sering tidak menentu. Penjualan ke pasar atau toko rata-rata hanya sekitar 1 – 1,5 ton per pengiriman, terutama sejak tahun 2001. Tahun sebelumnya volume penjualan Pak Hanto lebih tinggi. Ia mampu menjual satu truk atau sekitar 6 ton beras setiap kali pengiriman.

Biasanya pengusaha *selep* memberi pinjaman modal kepada para *penebasnya*. Pengusaha *selep* menerima padi dari *penebas* dalam keadaan kering giling (GKG). Artinya proses pengeringan padi harus dilakukan sendiri oleh *penebas*. Para *penebas* umumnya mempunyai pekerja sendiri untuk memanen, merontokkan padi, mengangkut, dan menjemur padi. Padi dijemur di lantai jemur yang disediakan secara gratis oleh pemilik *selep*. Pemilik *selep* biasanya juga menyediakan alat angkut truk bagi para *penebas* untuk mengangkut padi secara cuma-cuma, atau kalau pun dikenakan ongkos, biasanya ongkosnya kecil, sekedar pengganti ongkos bahan bakar atau uang lelah untuk sopir.

Saat ini di Desa Mojosari hanya terdapat dua *selep*, sama dengan keadaan pada tahun 1985, yang berbeda hanya kepemilikannya. Salah satu *selep* telah dibeli oleh seorang pengusaha Cina dari desa disekitar Desa Mojosari yang juga menjadi pemasok Dolog. Pengusaha ini juga memiliki satu unit *selep* lain di desa tidak jauh dari Desa Mojosari. Oleh pemiliknya, kedua *selep* ini hanya khusus digunakan untuk menggiling padi yang akan dikirim ke Dolog, dan tidak disewakan kepada warga desa kecuali di musim panen. Perusahaan *selep* besar ini memiliki sekitar 10 orang *penebas*. Dolog adalah tujuan pemasaran utama, sementara yang dijual ke pasar atau toko-toko beras hanya sekitar 10%, yang biasanya merupakan gabah atau beras yang ditolak oleh Dolog karena kualitasnya tidak memenuhi syarat. Harga jual beras atau gabah ke Dolog umumnya lebih tinggi dibanding dengan harga jual ke pasaran umum.

Penggilingan padi yang satunya tetap dimiliki oleh pemilik lama, tetapi dikelola oleh anaknya. Kondisi *selep* ini sangat memprihatinkan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1985. *Selep* ini tidak menjadi kontraktor Dolog serta tidak memiliki jaringan pemasaran, karena sejak dulu hanya menyewakan penggilingan padinya kepada petani, atau kepada para *penebas* dan *bakul* yang menjadi langganannya. Sejak dulu perusahaan ini hanya menggiling padi untuk pengusaha beras dan KUD pemasok Dolog, atau dari para petani. Karena perusahaan ini tidak mampu memberi modal kerja kepada para *penebas* atau *bakul* langganannya – kecuali dalam jumlah sangat kecil – maka volume gabah yang digilingkan oleh para *penebas* dan *bakul* saat ini juga semakin menurun. Nasib penggilingan padi ini diperburuk dengan adanya *selep-selep keliling* yang “menjemput bola” dengan cara datang langsung ke rumah-rumah petani. Akibatnya, perusahaan penggilingan padi menetap ini hampir bangkrut karena tergeser oleh *selep* keliling tersebut.

Yang juga cukup menarik dalam tata niaga beras di tingkat desa ini adalah bahwa para *penebas* tidak selalu masuk dalam jaringan pemasaran pengusaha penggilingan padi yang ada di desa. Misalnya, seorang *penebas* dari Desa Mojosari ternyata justru memiliki jaringan kerja dengan pengusaha penggilingan padi di Kota Pare, dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan penggilingan padi di desanya sendiri. Hal ini karena *penebas* tersebut mempunyai keterikatan kerja sejak awal dengan pengusaha di Kota Pare, termasuk menerima modal kerja dan menjadi anggota jaringan pengusaha penggilingan padi tersebut (lihat Kotak 3 di atas).

Pembelian gabah melalui *penebas* saat ini diperkirakan mencapai 70-80% dari total hasil panen padi di Desa Mojosari dan sekitarnya. Angka prosentase ini lebih besar dibanding kondisi pada tahun 1985. Menurut keterangan seorang pemasok Dolog, sebenarnya semua stok padi di Jombang dapat diserap oleh Dolog, karena target

pengadaan pangan yang dibebankan oleh pemerintah lebih besar daripada kapasitas produksi padi yang dihasilkan wilayah ini. Kondisi ini memberi peluang kepada para penebas atau pemasok untuk memperluas pengadaan gabah sampai ke wilayah lain. Misalnya, jangkauan kerja *penebas* tidak hanya di wilayah Kabupaten Jombang, tetapi juga di beberapa kabupaten sekitarnya, bahkan melampaui wilayah propinsi. Pada musim panen *rendeng* (panen di musim hujan), *penebas* membeli gabah mulai dari wilayah Sragen di Jawa Tengah yang masa panennya lebih awal (sekitar bulan Januari), kemudian dilanjutkan ke wilayah Nganjuk di Jawa Timur (bulan Pebruari), ke Ngawi (bulan Pebruari dan Maret), dan terakhir ke wilayah Jombang sendiri (Maret-April). Mudah-mudahan sarana komunikasi dan transportasi telah memperlancar para *penebas* dan pelaku pasar beras dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun jangkauan pembelian gabah oleh para *penebas* yang sangat luas ini memberikan dampak negatif bagi petani, yaitu *penebas* dapat menekan harga di tingkat petani. Hal ini menyebabkan harga gabah di tingkat petani pada musim panen menjadi sangat rendah.

Selain mata rantai *petani – penebas – kontraktor Dolog* yang sangat dominan, mata rantai pemasaran lain adalah pemasaran yang ditujukan langsung ke pasar atau toko-toko beras. Mata rantai kedua ini dimulai dari para *bakul* yang membeli gabah dari para petani baik dengan cara *menebas* atau membeli berupa gabah, *menyelepkan* gabah ke perusahaan penggilingan padi yang tidak terikat kontrak pengadaan pangan dengan Dolog, sampai menjual beras tersebut ke pasar atau toko-toko, atau langsung ke konsumen akhir. Biasanya perusahaan penggilingan padi besar selain menjadi pemasok Dolog, sekaligus juga sebagai pemasok (*supplier*) beras ke toko-toko atau pasar-pasar beras, sebelum beras tersebut dipasarkan ke konsumen akhir. Jenis beras yang dipasarkan para pemasok besar kebanyakan beras berkualitas untuk konsumsi golongan menengah keatas, misalnya beras Rojolele, Pandanwangi, Slep Super, di samping beras kualitas biasa yang dipasarkan ke pasaran umum, seperti beras IR-64, Cisadane, Memberano. Namun jenis beras yang disebut terakhir tidak dijumpai di Desa Mojosari, karena beras yang dipasarkan umumnya berasal dari para *bakul* atau beras Bulog/Dolog.

V. HARGA DAN TINGKAT KEUNTUNGAN

Harga Beras dan Gabah

Pada saat kunjungan lapangan kedua ini, harga gabah di Desa Mojosari sangat tidak menentu. Dengan semakin mudahnya sarana komunikasi dan transportasi, harga di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh perubahan harga dari luar. Dengan adanya kebijakan pemerintah bahwa swasta boleh mengimpor beras yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 1998, petani dan pedagang beras merasa sangat terpukul. Pada tahun 1998 impor beras di tingkat nasional mencapai lebih dari 7,1 ton (5,78 juta ton oleh Bulog dan 1,32 juta ton oleh swasta), yang merupakan jumlah impor tertinggi yang pernah dilakukan Indonesia selama ini. Tahun 1999 impor beras mencapai 5 juta ton terdiri dari 1,87 juta ton diimpor oleh Bulog dan 3,17 juta ton oleh swasta (lihat lampiran Tabel 10). Kondisi ini berbeda dengan keadaan tahun 1985 ketika harga beras relatif stabil karena semua kelebihan produksi gabah dapat diserap oleh Dolog dan saat itu tidak ada kebijakan impor beras setelah 1984 Indonesia mampu swasembada beras. Impor beras hanya dilakukan apabila produksi beras dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan nasional, dan itupun hanya dapat dilakukan oleh Bulog. Sejak tanggal 1 Januari 2000 pemerintah mengenakan bea masuk terhadap beras impor sebesar Rp 430 per kg. Meskipun demikian harga gabah di tingkat petani tetap terpuruk, bahkan Desa Mojosari mengalami harga gabah terendah selama beberapa tahun terakhir, dimulai sejak krisis moneter.

Perkembangan harga gabah dalam 2 tahun terakhir di Desa Mojosari (1998-2000) adalah sebagai berikut: tahun 2000 petani dapat menjual gabah (GKP) dengan harga Rp1.100 per kg atau dengan harga *tebasan* sekitar Rp700.000 *peratus*, tetapi saat kunjungan lapangan pada tahun 2001, variasi harga *tebasan* hanya berkisar antara Rp400.000 sampai Rp650.000 *peratus*. Panen kualitas utama memperoleh harga sekitar Rp650.000 dengan hasil panen sekitar 8-9 kuintal GKP *peratus* atau 6 ton per ha. Panen kualitas sedang sekitar Rp500.000 dengan hasil panen sekitar 7 kuintal *peratus* atau sekitar 5 ton per ha, dan panen kualitas kurang (rendah) sekitar Rp400.000 *peratus* dengan hasil panen 5,5 - 6 kuintal atau sekitar 4 ton per ha. Menurut seorang *penebas*, harga ini rata-rata setara dengan harga gabah GKP sekitar Rp700-Rp750 per kg. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2000, harga gabah di tingkat petani tahun ini mengalami penurunan sekitar 30%. Padahal kebijakan harga dasar gabah oleh pemerintah di tingkat Dolog tidak berubah. Apa yang sebenarnya terjadi?

Dari hasil temuan lapangan, diduga ada beberapa sebab utama yang menjadi penyebab jatuhnya harga beras dan gabah di tingkat petani. *Pertama*, panen raya menyebabkan pasar tidak mampu menyerap hasil panen. *Kedua*, perubahan kebijakan Bulog/Dolog mengenai pembelian gabah, yaitu yang semula berupa beras sejak tahun 2000 menjadi gabah, serta kebijakan Dolog mengenai pembelian beras yang menurun drastis sementara stock beras di tingkat kontraktor masih besar. *Ketiga*, kebijakan Dolog di tingkat lokal yang menghentikan untuk sementara pembelian gabah. *Keempat*, membanjirnya impor beras dari luar negeri menyebabkan harga beras di pasar semakin

menurun drastis, apalagi jika distribusi beras impor bersamaan waktunya dengan musim panen.

Saat ini, mekanisme pengadaan gabah lebih mudah, antara lain dalam berhubungan dengan Dolog. Pada tahun 1980 hingga 1990an kontraktor atau pemasok Dolog harus lewat KUD dan harus memberikan *fee* atau *margin* keuntungan kepada KUD. Sekarang pengusaha dapat langsung menandatangani kontrak pengadaan gabah dengan Dolog sekalipun hanya sebesar 35 ton untuk satu kali kontrak. Meskipun demikian, sejumlah pengusaha besar menilai kebijakan baru ini merugikan pihak pengusaha karena Dolog tidak membedakan antara perusahaan yang selama ini telah menjadi pemasok utama Dolog dan memiliki fasilitas lengkap, dengan perusahaan kecil yang sebenarnya tidak memiliki penggilingan padi sendiri.

Dengan harga *tebasan* antara Rp500.000-Rp600.000 *peratus* dan perkiraan hasil panen (GKP) sekitar 700-800 kg, harga ini setara dengan harga rata-rata GKP sekitar Rp715-Rp750 per kg. Harga yang diterima petani ini sangat rendah karena harga dasar untuk GKP pada saat penelitian Rp1.095 per kg. Ini berarti harga gabah yang diterima petani hanya sekitar 70% dari harga dasar GKP yang ditetapkan oleh Dolog.

Harga gabah yang diberikan oleh perusahaan pemasok Dolog/pemilik penggilingan besar padi kepada *penebas* atau bakul sekitar Rp900-Rp1.000 per kg (GKP) atau Rp1.200-Rp1.250 per kg (GKS). Harga yang diterima oleh *penebas* ini relatif baik, karena bila dibandingkan dengan harga dasar gabah Dolog untuk GKS sebesar Rp1.285 per kg, harga tersebut sudah sekitar 95% dari harga dasar gabah GKS. Selanjutnya, gabah tersebut disetorkan pengusaha penggilingan padi ke Dolog dengan harga Rp1.519 per kg. Namun untuk dapat memenuhi standar Dolog, gabah perlu diproses kembali. Penyusutan akibat pengipasan sekitar 6%. Untuk harga beras, harga penerimaan beras medium di tingkat pengusaha penggilingan padi sekitar Rp1.800-Rp1.900 per kg. Beras ini setelah diproses kembali akan disetorkan ke Dolog dengan harga Rp2.470 per kg. Beras yang tidak diterima oleh Dolog karena tidak memenuhi syarat akan dijual ke pasar, umumnya dengan harga yang lebih rendah.

Bila harga beras dikaitkan dengan jenis varitas padi, sebetulnya tidak ada perbedaan harga yang menyolok selama komoditas tersebut memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas berbagai jenis varitas padi tidak sama, sehingga tingkat harga yang diberikan juga berbeda, atau bahkan mungkin beras atau gabah tersebut ditolak oleh Dolog. Misalnya, Dolog di wilayah ini cenderung menerima gabah varitas IR-64 atau Kalimas, tetapi menolak varitas Memberano. Pada tahun 1985, varitas yang dinilai paling baik adalah jenis Krueng Aceh.

Di Pasar Koplakan, pasar beras terbesar di Kabupaten Jombang, harga eceran beras IR-64 saat kunjungan lapangan kedua adalah Rp1.900-Rp2.000 per kg, dan beras Memberano sekitar Rp2.300-Rp2.400 per kg. Dengan demikian harga beras di Pasar Koplakan masih lebih rendah dibanding dengan harga dasar pembelian beras oleh Dolog yang mencapai Rp2.470 per kg. Harga dasar beras Dolog ini hanya dapat diungguli oleh beras *poles* (beras IR-64 yang diselep kembali sehingga lebih putih). Beras ini dijual dengan nama beras Rojolele dengan harga mencapai Rp2.600 per kg.

Dengan kondisi pemasaran beras seperti di atas, tidak heran jika seorang pedagang besar beras pemasok Dolog yang memiliki jaringan pemasaran beras sampai ke luar Jawa mengeluh tentang keadaan pemasaran beras pada saat ini. Para pedagang merasa terancam dengan masuknya beras impor ke daerah-daerah yang selama ini menjadi basis pemasaran mereka. Meskipun pemerintah sudah menetapkan bea masuk impor beras, kondisi pemasaran beras dinilai masih tetap rawan karena banyak penyelundupan beras, terutama di luar Jawa. Menurut mereka kalau kegiatan penyelundupan tersebut tidak ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka akan sangat merugikan petani dan pedagang beras (lihat Kotak 4).

Kotak 4 **Nasib Seorang Kontraktor Dolog**

Perusahaan “Karya Kita” (bukan nama sebenarnya) adalah salah satu kontraktor Dolog di Jombang dengan kapasitas giling sekitar 12-15 ton per jam. Saat ini perusahaan tidak dapat bekerja secara penuh karena sistem pemasokan gabah disamakan dengan kontraktor kecil atau perusahaan yang tidak memiliki penggilingan sendiri. Menurutnya, Dolog tidak dapat menolak kontraktor kecil karena takut diprotes masyarakat.

Menurut pengusaha ini, pemasokan gabah ke Dolog saat ini tidak sulit, karena yang penting perusahaan dapat memenuhi standar kualitas dan hasil giling. Tiap kontrak dapat dibuka mulai dari 35 ton, 70 ton, 105 ton, 210 ton gabah, dan seterusnya. Namun masing-masing pemasok juga harus bertanggungjawab memproses gabah yang telah disetor menjadi beras sesuai dengan standar Dolog. Dibanding sebelumnya, pengadaan gabah oleh Dolog saat ini sangat menurun, hanya sekitar 60-70% dari total pengadaan gabah. Hal ini diduga karena adanya beras impor.

Kondisi pemasaran beras saat ini sedang tidak menguntungkan yang mengakibatkan harga beras rendah. Meskipun pemerintah sudah menetapkan bea masuk impor beras Rp430 per kg (kondisi tahun 2001), tetapi Indonesia masih rawan penyelundupan beras. Jika keadaan ini terus berlangsung dapat dipastikan pedagang beras akan keluar, dan pada akhirnya para petani juga akan terlibas dampak negatifnya. Pulau Jawa memproduksi sekitar 60% dari total produksi beras nasional. Jika penyelundupan impor beras - terutama di luar Jawa - tidak dapat dihentikan, maka akan lebih memukul petani padi di Jawa.

Tingkat Keuntungan

Pada bulan Mei 2001, harga *tebasan* padi pada saat kunjungan lapangan berkisar antara Rp500-Rp600 ribu *peratus* dengan perkiraan hasil panen (GKP) sekitar 700-800 kg atau harga rata-rata GKP sekitar Rp715-Rp750 per kg. Harga ini sangat rendah, karena harga patokan Dolog untuk GKP adalah Rp1.095 per kg. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan biaya usahatani di Desa Mojosari yang besarnya sekitar Rp500.000 per *peratus*, penerimaan petani hanya impas atau memperoleh keuntungan maksimal Rp100.000 *peratus* dalam satu musim. Namun karena dalam unsur biaya tersebut belum termasuk biaya untuk sewa tanah dan upah petani sendiri, maka dengan harga tersebut dapat diduga petani dalam posisi rugi.

Penebas menjual gabah (GKS) kepada pengusaha penggilingan padi atau pemasok Dolog dengan harga Rp1.200-Rp1.250 per kg. Setelah dikurangi biaya penyusutan dan biaya-biaya lainnya, seorang *penebas* dapat memperoleh keuntungan sekitar Rp100-Rp200 ribu *peratus*. Artinya, keuntungan seorang *penebas* dapat mencapai 20-25%. Tingkat keuntungan ini cukup tinggi. Para petani menyadari bahwa sistem *tebasan* lebih menguntungkan para *penebas*, namun petani umumnya tetap menyukai sistem *tebasan* karena petani dapat segera menerima uang tunai dan apabila sawah dipanen sendiri biayanya besar. Misalnya, ia harus mengeluarkan biaya untuk *bawon* sekitar 10%, ongkos angkut, biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya. Sistem *tebasan* juga lebih mudah dan pada akhirnya perolehan petani tidak jauh berbeda dengan apabila dipanen sendiri. Petani juga menyadari kadang-kadang para *penebas* juga dapat merugi, misalnya karena salah dalam memperkirakan hasil panen atau karena harga gabah di pasaran jatuh.

Selanjutnya pemasok menjual gabahnya ke Dolog dengan harga Rp1.519 per kg. Akan tetapi untuk dapat memenuhi standar Dolog biasanya gabah masih harus diproses kembali. Setelah dilakukan *pengipasan*, gabah akan mengalami penyusutan sekitar 6%. Dengan demikian tingkat keuntungan kotor yang diperoleh kontraktor atau pemasok Dolog adalah Rp161 per kg atau sekitar 10% dari harga dasar. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya tenaga kerja, ongkos angkut dan lain-lain, seorang pemasok Dolog diperkirakan dapat memperoleh keuntungan bersih rata-rata sekitar Rp50-Rp100 per kg. Karena para kontraktor pemasok ini menjual beras/gabah dalam jumlah besar, maka keuntungan yang diperoleh juga akan besar. Sebagai contoh, seorang pemasok yang memiliki mesin selep (*huller*) di Desa Mojosari dalam satu Musim Tanam 2000/2001 (musim *rendeng*) mampu memasok gabah GKG ke Dolog hingga 1.000 ton.

Harga penerimaan beras medium di tingkat pengusaha penggiling padi adalah Rp1.800-Rp1.900 per kg. Beras ini akan disetorkan ke Dolog dengan harga Rp2.470 per kg. Namun untuk dapat memenuhi standar Dolog, beras perlu diproses kembali. Penyusutan akibat proses *pengipasan* sekitar 6-10%. Apabila ditambah dengan biaya tenaga kerja, ongkos angkut dan pengepakan, tingkat keuntungan yang diperoleh pemasok diperkirakan sekitar Rp100-Rp200 per kg. Beras yang tidak diterima oleh Dolog akan dijual ke pasar, umumnya dengan harga yang sedikit lebih rendah. Apabila pengusaha tersebut tidak mampu memenuhi volume pasokan ke Dolog, biasanya ia akan bekerja sama dengan pengusaha lain yang memiliki simpanan gabah berlebih. Untuk itu ia memberikan imbalan kepada pengusaha tersebut sekitar Rp10-Rp15 per kg.

Pedagang beras di Pasar Koplakan mengambil keuntungan rata-rata antara Rp100-Rp150 per kg atau sekitar 5%. Beras Memberano dibeli dari para bakul atau pedagang beras dengan harga Rp2.200 per kg, kemudian dijual kembali dengan harga sekitar Rp2.300-Rp2.400 per kg. Beras varietas IR-64 dibeli dengan harga Rp1.800-Rp1.850 dan dijual kembali dengan harga Rp1.900-Rp2.000.

Sebagai pembandingan, hasil usahatani padi ini dapat dibandingkan dengan hasil usahatani penanaman jagung muda yang belakangan ini sedang berkembang di Mojosari. Biaya usahatani penanaman jagung muda hanya Rp250-Rp300 ribu *peratus* atau Rp1,75-Rp2,1 juta per ha untuk jangka waktu penanaman dua setengah bulan (70-75 hari). Harga tebasan tanaman jagung muda mencapai sekitar Rp600 ribu *peratus* atau Rp 4,2 juta per ha, artinya petani dapat memperoleh keuntungan hampir 100% selama satu musim tanam. Dari keuntungan ini, setelah dikurangi untuk biaya sewa tanah dan pajak, petani masih memperoleh keuntungan cukup besar. Tidak mengherankan bila penanaman jagung yang dipanen muda menjadi salah satu alternatif usahatani di Desa Mojosari.

V. KESIMPULAN

Selama 15 tahun terakhir ini ternyata telah banyak terjadi perubahan penting dalam usahatani sawah di Desa Mojosari. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: *Pertama*, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan usahatani, seperti UU Sistem Budidaya Tanaman, penghapusan subsidi pupuk dan pestisida, dibukanya keran impor beras untuk swasta, serta penghapusan mata rantai pemasokan gabah ke Dolog lewat KUD. *Kedua*, perubahan yang terjadi di desa sendiri sebagai akibat dari adanya interaksi atau inisiatif lokal. *Ketiga*, semakin mudahnya sarana komunikasi dan transportasi yang memudahkan petani mengakses berbagai informasi dari luar.

Banyak inisiatif masyarakat yang muncul untuk menunjang kegiatan pertanian. Misalnya, kini semakin banyak petani yang memanfaatkan sumur bor untuk mengairi sawah (terutama di musim kemarau), *huller keliling* yang datang ke rumah petani setiap saat diperlukan. Hubungan kekerabatan di desa yang sekarang semakin melonggar menyebabkan sistem *kedokan* dan sistem *bawon* nyaris tidak ada lagi, sebaliknya sistem *tebasan* semakin banyak digunakan. Karena sistem *tebasan* menjadi dominan, peran *loper* dan *nguyang* (membeli gabah hanya beberapa karung) ke rumah-rumah petani juga hampir hilang. Selain itu peranan tenaga kerja pasca panen di kalangan petani juga semakin berkurang. Misalnya, perontokan padi dengan cara *menggebuk* dan *tampen* telah digantikan dengan mesin perontok padi. Masyarakat kecil (biasanya kaum perempuan) yang dulu *mengasak* di sawah sehabis panen kini *mengasak* di lokasi perontokan padi, tidak lagi di sawah.

Inisiatif lain juga terlihat dalam upaya mengurangi biaya usahatani, seperti memanfaatkan pupuk kandang, penggunaan *tetes tebu* atau *pupuk Amina* untuk pemupukan yang sebenarnya dapat merusak tanah. Sementara dalam pemberantasan hama, petani mulai menggunakan *deterjen*, *sabun cuci "Wings"*, atau *karbit*.

Adanya inisiatif petani kecil dalam mengurangi biaya usahatani menyebabkan saat ini biaya usahatani petani yang memiliki garapan luas, yang lebih mampu melaksanakan usahatani sesuai dengan anjuran yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian, lebih besar dibandingkan dengan petani kecil. Biaya usahatani untuk petani kecil sekitar Rp300.000-Rp400.000 *peratus*, sedang untuk golongan petani kaya mencapai Rp500.000 *peratus*.

Petani sekarang banyak menanam varietas padi IR-64, Widas, Digul, Memberamo, Way Apo Buru, dan Kalimas yang pada tahun 1985 belum ada. Sebagian besar petani masih menanam IR-64 yang sudah tidak direkomendasikan oleh Dinas Pertanian karena benihnya sudah mulai rentan terhadap hama penyakit. Varietas padi jenis Kalimas dinilai paling unggul dan diperkirakan dapat menggantikan posisi padi IR-64.

Sistem "*glebakan*" yang dahulu mewajibkan petani menanam 1/3 areal tanahnya untuk menanam tanaman tebu sekarang juga tidak ada lagi. Penanaman kedelai semakin menyusut karena tidak lagi menguntungkan. Sekalipun pemerintah pernah mencanangkan Program *Gema Palagung* dan di desa telah tumbuh industri-industri

atau pengrajin pembuatan *tempe* dan *tahu*,²⁶ hal ini tidak cukup mendorong petani untuk menanam kedelai karena harga kedelai impor lebih murah daripada harga kedelai lokal dengan kualitas yang lebih baik. Petani sekarang banyak menanam tanaman jagung muda yang lebih menguntungkan. Dampak positif dari meluasnya penanaman jagung muda adalah berkembangnya usaha ternak sapi potong serta penggunaan pupuk kandang untuk petanian padi sawah.

Dalam mata rantai pemasaran gabah dan beras saat ini, para petani sangat dirugikan karena hanya menerima sekitar 70% dari harga dasar gabah yang ditetapkan oleh Dolog. Sebaliknya, para *penebas* yang terkait dengan pemasok Dolog dan menjadi penentu harga di tingkat petani relatif diuntungkan. Kebijakan Bulog/Dolog mengenai pengadaan beras dan gabah tanpa melalui KUD telah memberi kemudahan masyarakat untuk berhubungan langsung dengan Dolog, meskipun hal ini cukup memukul KUD dan pemasok besar Dolog. Sebaliknya pemberian izin impor beras kepada pihak swasta dinilai berdampak buruk terhadap harga gabah di tingkat petani. Seperti keadaan tahun 1985, nasib para petani di tingkat desa masih sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah terhadap pangan nasional. Dengan demikian setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut masalah pangan diharapkan petani agar tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan para petani.

²⁶ *Gema Palagung* adalah suatu gerakan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 1990-an dalam rangka menggalakkan penanaman tanaman padi, palawija dan jagung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Jombang, *Rencana Pengembangan Pertanian Terpadu Dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Jombang*, bekerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso, Nopember 2000.
- Beddu Amang dan M. Husein Sawit, *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional, Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi*, Maret 2001
- Lembaga Studi Agro Ekonomi, *Kelembagaan Pemasaran Input-Output Pertanian di Pedesaan Kabupaten Kediri*, bekerjasama dengan Bappenas, USAID, dan DAI, Draft Report, 2000
- James Fox, Tri Kadarsilo dan Bambang Soelaksono, *Rice Growing and Marketing in Mojokari, Kabupaten Jombang in 1985*, Final Draft, Nopember 1989
- Syaiku Usman dan M. Sulton Mawardi, *Gejolak Harga Beras Agustus-September 1998, Penelusuran Sebab Akibat*, Laporan Konsultan, Oktober 1998.
- BPS, *Statistik Indonesia Tahun 1998 dan 2001*
- BPS Propinsi Jawa Timur, *Jawa Timur Dalam Angka Tahun 1998 dan 2001*
- BPS Kabupaten Jombang, *Kabupaten Jombang Dalam Angka Tahun 1998 dan 2001*
- UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- Pikiran Rakyat, 27 Agustus 2002: Budi Rajab, *Ketahanan Pangan yang Rawan*.
- Kompas, 15 Agustus 2002: Andreas Maryoto, *Lahan Pertanian Termakan Pabrik dan Perumahan*.
- Kompas, 15 Agustus 2002: Menteri Pertanian Bungaran Saragih, *Konversi Lahan Terjadi akibat Harga Komoditas Pertanian Rendah*.
- Kompas, 15 Agustus 2002: *Petani Belum Siap Hadapi Perdagangan Bebas*.
- Media Indonesia, 17 Agustus 2002: Siswono Yudhohusodo, *Persaingan tidak Sehat Rugikan Petani*.
- Kompas, 19 Agustus 2002 : Dibyو Prabowo, *Dekati Pangan dari Sisi Produksi dan Konsumsi*.
- Kompas, 23 Agustus 2002: *Gubernur Jatim Takkan Cabut Larangan Bongkar Muat Beras Impor*.
- Kompas, 30 Agustus 2002: M. Fajar Harsah, *Impor Beras Bersaing dengan Produksi Dalam Negeri*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Rata-rata Produksi dan Pengeluaran Per Hektar Usaha Penanaman Jagung Muda di Desa Mojosari Tahun 2001

No.	Rincian	Nilai (Rp)	Banyaknya (Kg)	% Biaya terhadap produksi
A. PRODUKSI		4,2 juta	560 karung	100,0
B. PENGELUARAN		2.100.000	x	50,0
1.	Bibit	210.000		
2.	Pupuk (urea)	770.000	700	
3.	Obat hama	280.000		
4.	Biaya garap :			
	- Pengolahan tanah (<i>gawe, singkal</i>)	280.000		
	- Menanam (<i>gejik</i>)	245.000		
	- Menggemburkan tanah (<i>dangir</i>)	175.000		
	- Lainnya	140.000		

Sumber: Data lapangan, Tahun 2001.

LAMPIRAN 2

Harga Benih Padi dan Palawija di Desa Mojosari Tahun 2001

No.	Jenis Benih	Volume (kg)	Harga per kg		
			Benih SS	Benih ES	Benih Bina
I	Padi				
1.	Memberano	1		2.500-2.750	2.000-2.300
2.	IR-64	1		2.200-2.250	1.700-1.850
3.	Way Apo Buru	1		1.900	
4.	Widas/IR 69	1		2.250	
II	Jagung				
1.	Bisi 2	5		16.500	
2.	Bisi 5	5		16.500	
3.	Pioneer 7	5		102.500	
4.	Pioneer 8	5		95.000	
5.	Pioneer 11	2,4		46.500	
6.	Pioneer 13	2,4		50.000	

Sumber: Data lapangan, Tahun 2001.

LAMPIRAN 3

Jenis dan Harga Pestisida di Desa Mojosari Tahun 1984 dan 2001

No.	Jenis Pestisida	Volume		Harga (Rp)		Produsen
		Vol	Satuan	1985	2001	
1.	Diazinon	500	cc	900		Petrokimia Gresik
2.	Basudin	500	ml	900		Ciba-Geigy
3.	Lebaycid	500	cc	1.100		Bayer
4.	Furadan	2	kg	1.100	14.500	FMC Corp.
5.	Sevin	500	gr	1.000		Agrocarb
6.	Elsan	500	cc	1.500		Nissan
7.	Thiodan	500	cc	3.500		Hoechst
8.	Padacin	2	kg	1.000		Takeda
9.	Arrivo 30 Ec	500	ml	-	28.000	
10.	Baycart	500	ml	-	28.000	
11.	Dursban 20 Ec	500	ml	-	30.000	
12.	Acodan	100	cc	-	9.000	
13.	PPC	500	ml	-	17.000	

Sumber: Data lapangan, Tahun 1985 dan 2001.

LAMPIRAN 4

Rata-rata Produksi dan Pengeluaran Per Hektar Usaha Penanaman Tanaman Padi Sawah di Jawa Timur Tahun 1998/99

No.	Rincian	Nilai (Rp)	Banyaknya (Kg)	% Biaya terhadap produksi
JUMLAH PRODUKSI		5.930.009	5.196	100,0
JUMLAH PENGELUARAN		1.778.740	x	30,0
1.	Bibit :			
	a. Pembelian	91.209	34,94	1,54
	b. Produksi sendiri	38.509	18,61	0,65
2.	Pestisida			
	a. Insektisida - padat	24.420	2,27	0,41
	- cair	43.205	0,75	0,73
	b. Lainnya: - padat	2.886	0,17	0,05
	- cair	2.221	0,04	0,04
3.	Pupuk			
	a. Pabrik/kimia			
	- Urea	342.613	327,87	5,78
	- TSP/DAP	141.740	100,42	2,39
	- Lainnya	55.934	48,64	0,94
	b. Kandang/Hijau	6.084	x	0,10
4.	Biaya:			
	a. Sewa alat pertanian	23.555	x	0,40
	b. Sewa hewan	36.795	x	0,62
	c. Biaya pengairan	41.801	x	0,70
	d. Pemeliharaan alat/sarana	13.524	x	0,23
		21.804	x	0,37
	e. Biaya pengangkutan	11.032	x	0,19
	f. Lainnya			
5.	Upah Buruh			
	a. Mencangkul	105.275	x	1,78
	b. Membajak	74.368	x	1,25
	c. Menanam	154.707	x	2,61
	d. Memupuk	32.250	x	0,54
	e. Memberantas hama	13.594	x	0,23
	f. Menyiangi	153.593	x	2,59
	g. Memanen	275.666	x	4,65
	h. Lainnya	32.633	x	0,54
6.	Pengeluaran lain			
	a. Pajak	26.633	x	0,45
	b. Lainnya	13.120	x	0,22

Sumber: Statistik Tahunan Indonesia, 1998.

LAMPIRAN 5

Impor Beras oleh Bulog dan Swasta Tahun 1990-2000 (dalam Ton)

Tahun	Bulog	Swasta	Total
1990	29.839	0	29.839
1991	178.880	0	178.880
1992	634.217	0	634.217
1993	0	0	0
1994	876.240	0	876.240
1995	3.014.204	0	3.014.204
1996	1.090.258	0	1.090.258
1997	405.974	0	405.974
1998	5.782.926	1.317.753	7.100.679
1999	1.873.275	3.170.602	5.043.877
2000	555.567	1.244.433	1.800.000

Sumber: Bulog dan Bea Cukai untuk Impor Swasta. Kecuali data tahun 2000 yang berasal dari *Rice Trader* dan Bulog (data sampai bulan Oktober 2000), dalam Kebijakan Beras dan Pangan Nasional, Beddu Amang dan M Husein Sawit, Maret 2001.

LAMPIRAN 6

Kebijakan Harga Dasar Gabah dan Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah Tahun 1974-2001

Tahun	Harga Dasar Gabah	Harga Pembelian (Rp per kg)			
		Gabah		Beras	
		KUD	Non-KUD	KUD	Non-KUD
1974/75	41,80	41,80	41,80	68,50	68,50
1975/76	58,50	59,00	59,00	97,00	97,00
1976/77	68,50	69,50	69,50	108,00	108,00
1977/78	71,00	72,00	72,00	110,00	110,00
1978/79	75,00	77,50	77,50	119,50	119,50
1979/80 I	85,00	88,00	88,00	140,00	139,00
1979/80 II	95,00	100,00	98,00	158,00	156,00
1980/81	105,00	111,00	108,00	175,00	172,00
1981/82	120,00	128,00	123,00	195,00	191,00
1982/83	135,00	146,00	139,50	214,00	210,00
1983/84	145,00	156,00	152,00	238,00	233,00
1984/85	165,00	177,70	172,70	270,00	264,00
1985/86	175,00	187,70	182,70	285,00	279,00
1986/87	175,00	187,70	182,70	285,00	279,00
1987/88	190,00	202,70	197,70	313,00	307,00
1988/89	210,00	222,70	217,70	344,00	338,00
1989/90 I	250,00	262,70	257,70	405,00	399,00
1989/90 II	250,00	262,70	257,70	410,00	404,00
1989/90 III	250,00	262,70	257,70	420,00	414,00
1990	270,00	282,70	277,70	436,00	430,00
1991	295,00	310,00	305,00	480,00	474,00
1992	320,00	346,00	341,00	536,00	530,00
1993	340,00	356,00	351,00	551,00	545,00
1994	360,00	376,00	371,00	592,00	586,00
1995	400,00	416,00	411,00	657,00	652,00
1996	450,00	466,00	460,00	738,00	730,00
1997	525,00	547,00	535,00	856,00	848,00
1998 I	600,00	616,00	610,00	971,00	961,00
1998 II	700,00	716,00	710,00	971,00	961,00
1998 III	1.000,00	1.016,00	1.010,00	1.660,00	1.650,00
1998 IV	-	-	-	2.400,00	2.390,00
1999	1.400,00	1.419,00	1.410,00	2.310,00	2.295,00
2000	1.500,00	1.519,00	1.519,00	2.470,00	2.470,00
2001	1.500,00	1.519,00	1.519,00	2.470,00	2.470,00

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, 2001.

LAMPIRAN 7

Harga Eceran Pupuk di Indonesia Tahun 1969-2001

Tahun	Harga Pupuk (Rp/Kg)				Tgl Kebijakan
	Urea	TSP	ZA	KCl	Dikeluarkan
1969 - 1973	26.2	26.6			1969
1973 - 1974	40	50			1973
1974 - 1975	60	60			1974
1975 - 1976	80	80			Nov-75
1976 - 1982	70	70			Oct-76
1982 - 1984	90	90	90	90	Nov-82
1984 - 1986	100	100	100	100	Nov-84
1986 - 1987	125	125	125	125	Apr-86
1987 - 1988	135	135	135	135	Oct-87
1988 - 1989	165	170	165	165	Oct-88
1989 - 1990	185	210	185	210	Oct-89
1990 - 1991	210	260	210	260	Oct-90
1991 - 1992	220	280	220	280	Oct-91
1992 - 1993	240	310	240	350	Oct-92
1993 - 1994	260	340	240	bebas	Oct-93
1994 - 1995	260	480	295	bebas	Oct-94
1995 - 1996	265	480	295	bebas	
1996 - 1997	486	675	506	bebas	
1997 - 1998	1,200	1,700	1,000	2,000	
1999	1,000	1,000	900	1,800	Des-98
2000	1,115	1,600	1,000	1,650	*)
2001	1,000	1,400	850	1,500	**)

Catatan: *) Harga eceran tertinggi PT Pusri, setelah subsidi pupuk dihapus oleh pemerintah sejak Desember 1998.

***) Data lapangan.

- Sumber: 1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, 1995.
 2) Kelembagaan Pemasaran Input-Output Pertanian di Pedesaan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, CASER bekerjasama dengan Bappenas, USAID dan DAI, 2000 (draft report).